

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

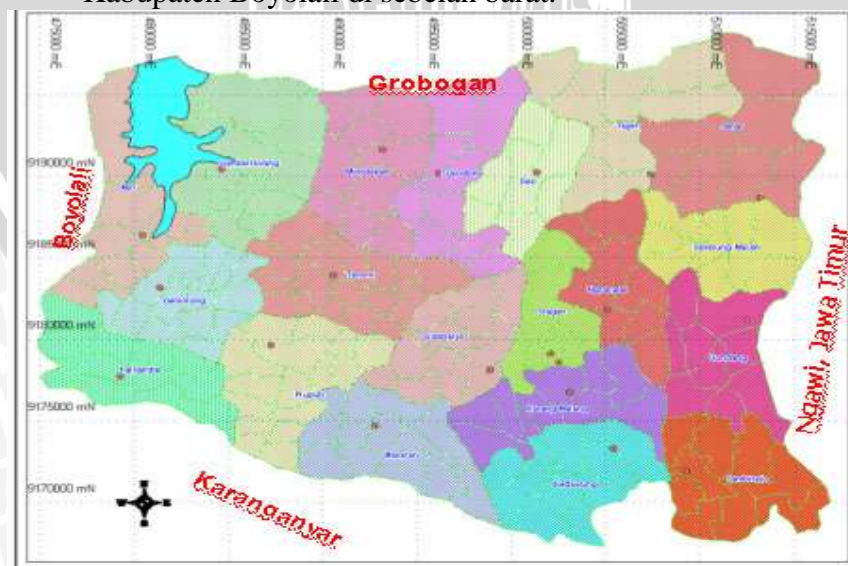
A. Gambaran Umum

1. Lokasi Penelitian Kabupaten Sragen

a. Keadaan Geografis

Kabupaten Sragen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dan terletak pada $110^{\circ} 15'$ sampai $111^{\circ} 45'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 15'$ Lintang Selatan sampai $7^{\circ} 30'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah 941.36 km^2 dengan batas wilayah:

- Kabupaten Grobogan di sebelah utara,
- Kabupaten Ngawi (Jawa Timur) di sebelah timur,
- Kabupaten Karanganyar di sebelah selatan, dan
- Kabupaten Boyolali di sebelah barat.



Gambar. 3 Peta Kabupaten Sragen

Sumber : www.sragenkab.go.id/

Wilayah Kabupaten Sragen mempunyai ketinggian antara 84 meter sampai dengan 190 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Sragen dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a. Sebelah selatan Bengawan Solo (9 Kec. 88 Desa & Kelurahan) :

- Luas Wilayah : 32.760 ha (34,79 %)
- Tanah Sawah : 22.027 ha (54,85 %)

b. Sebelah utara Bengawan Solo (11 Kec. 120 Desa):

- Luas Wilayah : 61.395 ha (65,21 %)
- Tanah Sawah : 18.102 ha (45,15 %)

Dari keadaan geografis ini, memungkinkan Kabupaten Sragen memiliki potensi pertanian yang bagus, yang didukung sumber air yang melimpah, dan tanah yang subur. Kabupaten Sragen terdiri atas 20 kecamatan, yang dibagi lagi atas sejumlah 208 desa dan kelurahan dengan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Sragen.

Kabupaten Sragen untuk pembangunan dan perkembangannya memiliki visi Kabupaten Sragen dalam jangka tahun 2011 –2016 adalah:

**“BERJUANG UNTUK SRAGEN YANG JUJUR, ADIL
DAN MAKMUR”**

Penjabaran dari Visi tersebut adalah:

- BERJUANG mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan sinergi dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sragen yang dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.

- JUJUR mempunyai makna bahwa penyelenggara pemerintahan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan niat dan itikad baik dilandasi ketulusan, transparansi dan keikhlasan serta menjunjung tinggi good governance dan clean government.
- ADIL mempunyai makna bahwa semua unsur masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan di semua bidang dan hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat (MBELA WONG CILIK) Berpihak Kepada Rakyat Kecil
- MAKMUR mempunyai makna bahwa pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat (pangan, sandang dan papan) dan merupakan refleksi pengurangan kemiskinan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial.

Usaha untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sragen tersebut, maka dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam wujud 5 (lima) butir Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sragen ASRI bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro rakyat.
2. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Profesional, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.

3. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. Memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan.
5. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan.

Kabupaten Sragen terdiri dari 20 kecamatan, diantaranya:

Tabel 2. Luas Wilayah per Kecamatan di Kabupaten Sragen

KECAMATAN	JUMLAH (Ha)	PERSENTASE LUASAN
01. Kalijambe	4696	4.99%
02. Plupuh	4836	5.14%
03. Masaran	4404	4.68%
04. Kedawung	4978	5.29%
05. Sambirejo	4843	5.15%
06. Gondang	4117	4.37%
07. Sambungmacan	3848	4.09%
08. Ngrampal	3440	3.66%
09. Karangmalang	4298	4.57%
10. Sragen	2727	2.90%
11. Sidoharjo	4590	4.88%
12. Tanon	5100	5.42%
13. Gemolong	4023	4.27%
14. Miri	5381	5.72%
15. Sumberlawang	7516	7.99%
16. Mondokan	4936	5.24%
17. Sukodono	4555	4.84%
18. Gesi	3958	4.21%
19. Tangen	5513	5.86%
20. Jenar	6396	6.80%
JUMLAH	94115	100.00%

Sumber : Sragenkab.go.id

Kabupaten Sragen dikenal sebagai lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah, memiliki sawah penghasil padi, berikut jumlah produksi padi di Kabupaten Sragen:

Tabel 3. Produktivitas padi selama 6 tahun terakhir di Kabupaten Sragen

	Luas panen (HA)	Produktivitas (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
TAHUN 2012	96,893	60.31	582,562
TAHUN 2011	96,272	63.30	609,372
TAHUN 2010	95,876	56.56	542,299
TAHUN 2009	89,463	57.14	511,147
TAHUN 2008	80,204	57.57	461,774
TAHUN 2007	90,833	54.35	493,681

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

b. Demografi / Kependudukan

Demografi / gambaran kondisi penduduk Kabupaten seperti jumlah penduduk dan laju pertumbuhannya, distribusi penduduk, rasio jenis kelamin, serta rata-rata penduduk per-rumahtangga. Dari hasil Sensus Penduduk 2010 Kabupaten Sragen, diperoleh jumlah penduduk di wilayah Sragen sebanyak 856.483 jiwa. Komposisi laki-laki 420.173 jiwa dan perempuan 436.310 jiwa, dengan rasio jenis kelamin 96.30. Jumlah penduduk ini berasal dari 247.230 rumahtangga. Dengan perbandingan jumlah penduduk pada tahun 2000 sebesar 854.111 jiwa, maka Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Sragen pada periode waktu 2000-2010 sebesar 0,03 % per-tahun. Kecamatan Masaran merupakan wilayah yang memiliki jumlah penduduk terbanyak yakni 68.746 jiwa atau 8,03% dari total penduduk di Kabupaten Sragen. Kecamatan Sragen (66.708 jiwa atau 7,79%), sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit Kecamatan Gesi (19.552 jiwa atau 2,28%).

Rasio Jenis Kelamin (sex ratio), lanjut Laeli, menggambarkan banyaknya laki-laki per 100 perempuan, yakni dibawah 100 (lebih banyak perempuan

dibandingkan laki-laki). Untuk Kabupaten Sragen sex ratio adalah 96,30 artinya jumlah penduduk perempuan 3,70 persen lebih banyak dibanding laki-laki. Hanya Kecamatan Kalijambe yang memiliki sex ratio diatas 100. Rata-rata penduduk per-rumahtangga berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2010 di Kabupaten Sragen adalah sebesar 3,46 jiwa, jumlah rumah tangga 247.230. Dengan demikian terjadi penurunan rata-rata penduduk per-rumahtangga dibandingkan tahun 1990 sebesar 4,26 dan tahun 2000 sebesar 3,75. Besaran rata-rata penduduk per-rumahtangga yang tertinggi di Kecamatan Sragen dan Masaran yakni 3,74 penduduk per-rumahtangga. Terendah Kecamatan Sukodono 3,15 penduduk per-rumah tangga. Dalam 5 tahun terakhir, penduduk di Kabupaten Sragen sendiri terus bertambah, hal ini dapat ditunjukkan dengan data di tabel berikut:

Tabel 4. Demografi Kabupaten Sragen

Tahun	2011	2010	2009	2008	2007
Jumlah Pria (jiwa)	439.565	437.269	433.987	431.191	428.876
Jumlah Wanita (jiwa)	448.15	446.195	443.415	440.76	438.696
Total (jiwa)	887.715	883.464	877.402	871.951	867.572

Sumber Data: <http://sragenkab.bps.go.id> (Updated: 28-5-2012)

c. Keadaan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sragen selama beberapa waktu terakhir pada angka positif, merupakan hasil dari kerja keras seluruh perangkat perekonomian baik dunia usaha maupun pemerintah daerah yang dapat memanfaatkan peluang dengan tepat. Tetapi ada beberapa aspek yang perlu digarisbawahi terkait dengan pertumbuhan ekonomi terlepas dari berapa besar nilai pertumbuhannya, yaitu ada pertumbuhan ekonomi yang baik, yaitu pertumbuhan

ekonomi pada sektor-sektor atau kegiatan ekonomi yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti sektor pertanian, sektor industri ataupun sektor ekonomi lainnya, sehingga akan memiliki pengaruh ganda terutama didalam penyerapan tenaga kerja.

Tabel 5. Distribusi sektoral tenaga kerja

	Pekerjaan menurut lapangan usaha	pekerja yang terserap
a.	Pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan	172160
b.	Pertambangan dan penggalian	1236
c.	Industri pengolahan	57673
d.	Listrik , gas dan air	658
e.	Bangunan	28748
f.	Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel	99340
g.	Angkutan, penggudangan dan komunikasi	10231
h.	Keuangan, asuransi, usaha sewa bangunan, tanah dan jasa perusahaan	10647
i.	Jasa kemasyarakatan	52927

Sumber: Sragen dalam angka 2011

PDRB Kabupaten Sragen bisa tumbuh sebesar 6,53%. Menurut harga konstan secara agregat terjadi pertumbuhan, dari Rp. 3.069.751,14 juta pada tahun 2010 naik menjadi Rp. 3.270.052,52 juta di tahun 2011 sehingga mengalami laju pertumbuhan sebesar 6,53 %. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran yang tumbuh sebesar 8,36 % disusul sektor Industri Pengolahan yang tumbuh sebesar 8,05 %, dan sektor Pengangkutan dan Komunikasi yang tumbuh sebesar 7,59 %. Sedangkan kenaikan terkecil dialami oleh sektor Pertanian yang tumbuh hanya sebesar 4,00 %. Sektor Pertanian ini terus mengalami penurunan selama 3 tahun terakhir. Walaupun demikian, peran sektor Pertanian masih cukup besar dalam mendorong pergerakan ekonomi di Kabupaten

Sragen. Komoditi-komoditi di sektor Pertanian sebagian besar merupakan penggerak di sektor lainnya.

Tabel 6. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2011

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku		PDRB Atas Dasar Harga konstan	
	Nilai (juta Rp)	% Pertumbuhan	Nilai (juta)	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	1.907.231,61	-	1.907.231,61	-
2001	2.140.956,11	12,25	1.963.635,72	2,96
2002	2.396.061,90	11,92	2.030.754,79	3,42
2003	2.699.973,28	12,68	2.104.533,13	3,63
2004	3.059.653,15	13,32	2.208.294,40	4,93
2005	3.497.324,94	14,30	2.322.239,43	5,16
2006	4.042.561,37	15,59	2.442.570,43	5,18
2007	4.512.415,74	11,62	2.582.492,48	5,73
2008	5.170.914,12	14,59	2.729.450,33	5,69
2009	5.871.144,81	13,54	2.893.427,21	6,01
2010	6.695.257,97	14,04	3.069.751,14	6,09
2011	7.579.678,26	13,21	3.270.052,52	6,53

Sumber: *Ulasan PDRB Kabupaten Sragen 2011*

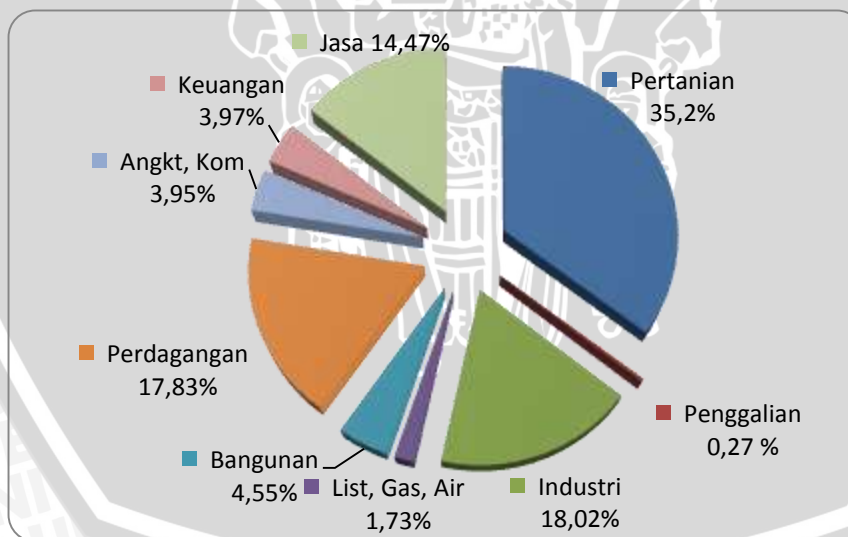
Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan gambaran struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin besar nilainya memiliki arti bahwa sektor tersebut semakin berperan didalam pembentukan perekonomian di wilayah tersebut dan sebaliknya. Sebagai daerah agraris, perekonomian di Kabupaten Sragen masih sangat didominasi oleh sektor pertanian, terutama pertanian tanaman pangan.

Tabel 7. Distribusi PDRB Kabupaten Sragen Tahun 2011

SEKTOR	DISTRIBUSI PDRB (%)	
	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	35,20	32,45
2. Pertambangan dan Penggalian	0,27	0,29
3. Industri Pengolahan	18,02	22,58
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	1,73	1,21
5. Bangunan/Konstruksi	4,55	4,42
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	17,83	19,11
7. Pengangkutan dan Komunikasi	3,95	3,36
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	3,97	4,11
9. Jasa-Jasa	14,47	12,47

Sumber: Ulasan PDRB Kabupaten Sragen 2011

Bila dilihat dari harga berlaku, maka PDRB Kabupaten Sragen dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Grafik Distribusi PDRB Kabupaten Sragen atas dasar harga berlaku tahun 2011

Sumber: Ulasan PDRB Kabupaten Sragen 2011

Meskipun belum dapat mencerminkan tingkat pemerataan, PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu tolok ukur guna melihat keberhasilan

pembangunan perekonomian khususnya tingkat kemakmuran penduduk pada suatu wilayah secara makro, sehingga tidak hanya keberhasilan pembangunan dari sisi aspek pertumbuhan perekonomian suatu wilayah saja akan tetapi lebih jauh dapat dilihat juga tingkat besarnya PDRB / pendapatan perkapita khususnya PDRB perkapita menurut harga berlaku.

Tabel 8. Produk Domestik Regional Bruto Perkapita Kabupaten Sragen Tahun 2000 – 2011

Tahun	PDRB Perkapita Menurut Harga Berlaku		PDRB Perkapita Menurut Harga Konstan	
	R u p i a h	% Pertumbuhan	R u p i a h	% Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2000	2.257.364,67	-	2.257.364,67	-
2001	2.524.155,77	11,82	2.315.097,64	2,56
2002	2.817.553,87	11,62	2.387.985,48	3,15
2003	3.134.761,57	11,26	2.443.435,14	2,32
2004	3.580.727,82	13,08	2.584.378,29	4,71
2005	4.082.059,56	14,00	2.710.505,84	4,88
2006	4.694.702,49	15,01	2.836.602,94	4,65
2007	5.212.188,54	11,02	2.982.978,18	5,16
2008	5.945.205,84	14,06	3.138.157,72	5,20
2009	6.709.327,70	12,85	3.306.501,87	5,36
2010	7.604.504,79	13,34	3.486.637,98	5,45
2011	8.558.907,10	12,55	3.692.515,01	5,90

Sumber: *Ulasan PDRB Kabupaten Sragen 2011*

Dilihat dari data PDRB di atas, untuk investasi Kabupaten Sragen memiliki potensi dalam pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam pengembangan padi organik.

d. Pertanian Kabupaten Sragen

Peran pertanian di Kabupaten Sragen memiliki peran yang sangat penting. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi sektor pertanian sebagai sumber perekonomian dan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Dalam hal ini, pertanian padi masih menjadi primadona yang ditunjukkan dengan hasil panen

padi yang selalu surplus dari tahun ke tahun (tabel 1). Kemajuan teknologi dan berkembangnya kesadaran akan pentingnya lingkungan, menjadi peluang tersendiri yang dilihat oleh Kabupaten Sragen untuk mengembangkan padi organik. Padi organik yang dikembangkan di Kabupaten Sragen sudah sejak tahun 2001, sehingga saat ini padi organik sudah menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sragen. Dalam proses pengembangan padi organik, pemerintah bekerja beberapa dinas terkait yang berwenang, diantaranya: Dinas Pertanian(Dispertan), Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

2. Gambaran Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen

a. Profil BAPPEDA, Visi dan Misi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen terletak tepat di komplek pemerintahan Pemkab Sragen Jalan Raya Sukowati No.255, Sragen. Lokasinya tepat berada di belakang kantor sekretariat daerah, sehingga mudah untuk ditemukan. Sesuai dengan visi misi bupati yang ada, untuk tahun 2011 s.d 2016 visi dari BAPPEDA sendiri adalah:

“Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner, profesional dan kredibel.”

Penjabaran dari visi BAPPEDA tersebut adalah:

Visi diatas merupakan suatu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh Bappeda kabupaten Sragen sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan

daerah. Bappeda Kabupaten Sragen berkewajiban menyusun rencana pembangunan yang mempertimbangkan pengalaman empiris masa lalu, kondisi saat ini sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan rumusan kebijaksanaan perencanaan untuk masa yang akan datang.

1. **Visioner** adalah memiliki wawasan kedepan yang selalu mengutamakan prinsip partisipatif (memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan secara aktif dalam proses), inovatif (mampu menciptakan dan menemukan hal-hal baru), adaptif (dapat menyesuaikan diri dengan keadaan), antisipatif (tanggap dalam proses), dan bertanggung jawab.
2. **Profesional:** SDM perencana yang dimiliki harus memiliki kompetensi dalam melakukan tugas perencanaan dan mampu melakukan koordinasi. Serta melaksanakan pemantauan dan evaluasi sehingga dapat menghasilkan dokumen perencanaan serta laporan hasil pembangunan yang berkualitas.
3. **Kredibel:** dapat dipercaya dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance, yang meliputi akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

Agar dapat mencapai visi di atas, BAPPEDA Sragen menjabarkannya dengan misi. Oleh karenanya, misi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen adalah:

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang visioner melalui proses top down dan bottom up (partisipatif). Misi ini berusaha dicapai dengan:
 - a) Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi

- b) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, koordinasi antar SKPD dan stakeholder terkait.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan, kompetensi dan profesionalisme SDM perencana pembangunan daerah. Misi ini berusaha dicapai dengan:
 - Meningkatkan kapasitas perencanaan dengan mengupayakan peningkatan kemampuan personil dan kelembagaan sehingga dapat memberikan pelayanan penunjang yang prima kepada semua pihak.
3. Mengkoordinasikan kegiatan pembangunan lintas sektor, disertai pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang kredibel. Misi ini berusaha dicapai dengan:
 - a) Meningkatkan koordinasi pembangunan lintas sektor baik secara vertikal, horisontal maupun diagonal yang efektif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - b) Pengendalian dan evaluasi Tugas Pembantuan (TP) dan Dana Urusan Bersama (DUB). Serta, monitoring dan evaluasi untuk seluruh kegiatan pembangunan daerah dengan membuat laporan hasil pembangunan daerah yang lengkap dan akurat
 - c) Meningkatkan ketersediaan dan pengelolaan data, informasi, dokumen perencanaan, penelitian dan pengembangan yang kredibel untuk rencana Pembangunan.

b. Tugas, Pokok, dan Fungsi dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Sragen

Sesuai dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kabupaten Sragen. Bappedda memiliki tugas untuk: “Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah di bidang Perencanaan Pembangunan daerah serta penilaian atas pelaksanaannya.”

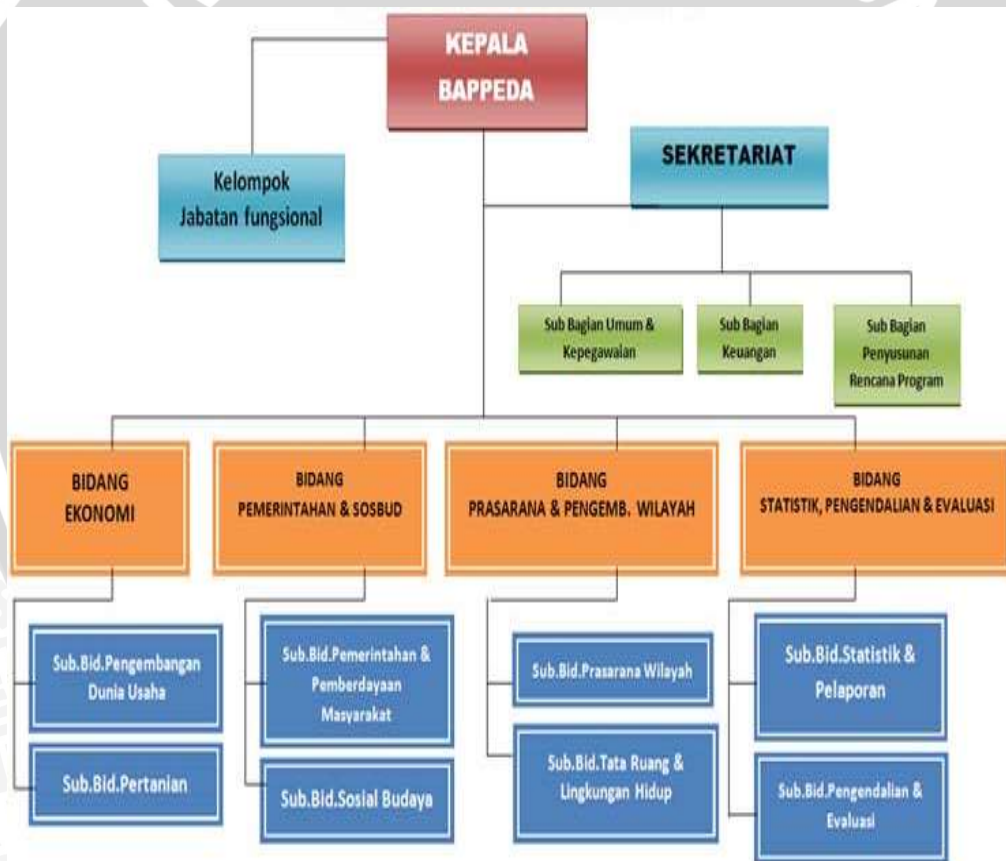
Selain itu, Bappedda memiliki fungsi:

1. Merumuskan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah;
2. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah;
3. Menyusun program-program perencanaan pembangunan tahunan/Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai pelaksanaan / penjabaran tersebut huruf b pasal ini;
4. Membahas dan mengkoordinasikan usulan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belanja langsung dan belanja tak langsung bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD)
5. Melaksanakan tugas koordinasi untuk kepentingan perencanaan pembangunan;

6. Melaksanakan tugas mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan daerah untuk penyempurnaan perencanaan pembangunan selanjutnya;
7. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan oraganisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Kabupaten Sragen



Sumber: Bappeda Kabupaten Sragen

Gambar 5. Bagan Organisasi Bappeda Kabupaten Sragen

3. Gambaran Umum Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sragen

a. Profil Dispertan, Visi dan Misi

Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sragen adalah dinas daerah yang bertugas untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring / evaluasi dan koordinasi dalam bidang pertanian di Kabupaten Sragen. Dispertan Kabupaten Sragen dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sragen No. 14 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Sragen. Dalam kegiatan kedinasannya yang disesuaikan dengan visi misi bupati, Dispertan memiliki visi tahun 2011 – 2016 adalah sebagai berikut:

” Berjuang Untuk Sragen Yang Jujur, Adil dan Makmur ”

Dari visi di atas, maka oleh Dispertan sendiri diuraikan sebagai berikut:

- a. **Berjuang** : mempunyai makna penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan adalah merupakan sinergi dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sragen yang dilandasi semangat pengabdian kepada masyarakat dan Tuhan Yang Maha Esa.
- b. **Jujur** : mempunyai makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dengan niat dan itikad baik dilandasi ketulusan, transparansi dan keikhlasan serta menjunjung tinggi good governance dan clean government.
- c. **Adil** : mempunyai makna bahwa semua unsur masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan disemua

bidang dan hasilnya dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat (MBELO WONG CILIK).

- d. **Makmur** : mempunyai makna bahwa pembangunan harus dapat memenuhi kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat (pangan, sandang dan papan) dan merupakan refleksi pengurangan kemiskinan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan, kepedulian terhadap sesama serta pengembangan rasa kesetiakawanan sosial.

Dalam usaha untuk mewujudkan visi tersebut, Dispertan Sragen menjabarkannya menjadi 5 butir misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sragen Asri bebas korupsi sebagai perwujudan reformasi birokrasi yang sungguh-sungguh atas kebekuan birokrasi menuju aparatur yang bersih berorientasi kepada pelayanan publik serta penggunaan anggaran yang pro rakyat.
2. Mewujudkan kualitas SDM yang Profesional, Berbudaya dan Berakhlak Mulia.
3. Memberikan kesempatan dan peluang kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta menikmati hasil-hasil pembangunan.
4. memecah stagnasi pembangunan dengan mengakselerasi secara cerdas pencapaian kesejahteraan masyarakat dibidang daya beli, kualitas pendidikan dan kesehatan.
5. Mewujudkan Pengembangan Ekonomi Kerakyatan yang berbasis pada pembangunan pertanian berkelanjutan.

b. Tugas, Pokok, dan Fungsi dari Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sragen

Sesuai dengan Perda No. 14 tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten Sragen, Dispertan memiliki tugas pokok “Pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanian”. Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dispertan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
4. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
5. Pembinaan UPTD pertanian dan ketahanan pangan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

c. Susunan oraganisasi Dinas Pertanian (Dispertan) Kabupaten Sragen



Sumber: Dispertan Kabupaten Sragen

Gambar 6. Bagan Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Sragen

4. Gambaran Umum Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten Sragen

a. Profil Bappeluh, Visi dan Misi

Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) adalah badan yang terbentuk sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah yang ditunjang dengan Perda Kabupaten Sragen No. 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Sragen. Bappeluh Kabupaten Sragen beralamat di Jalan Mayor Soeharto No. 7, yang menjadi satu kompleks dengan Dispartan dan Kantor Ketahanan Pangan. Dalam melakukan tugasnya, Bappeluh Kabupaten Sragen memiliki visi masa 2011 – 2016 sebagai berikut:

“Prima dalam mengembangkan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan”

Uraian dari pernyataan visi di atas adalah sebagai berikut:

Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen dalam Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan mampu meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan, mengembangkan kelembagaan penyuluhan yang mandiri dan meningkatkan profesionalisme penyuluh dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia, teknologi baru yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan aparat. Penyuluh pertanian harus **PRIMA**, yaitu **P**rofesional dan handal, **R**esponsif dan proaktif, **I**novatif dan kreatif, **M**otivasi dan peduli, serta **A**kuntabel dan amanah.

Dengan penjabaran visi seperti di atas, untuk mencapainya, Bappeluh menggunakan misi sebagai berikut:

“Mewujudkan masyarakat tani Profesional, Mandiri, dan Sejahtera”

Penjelasan dari misi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

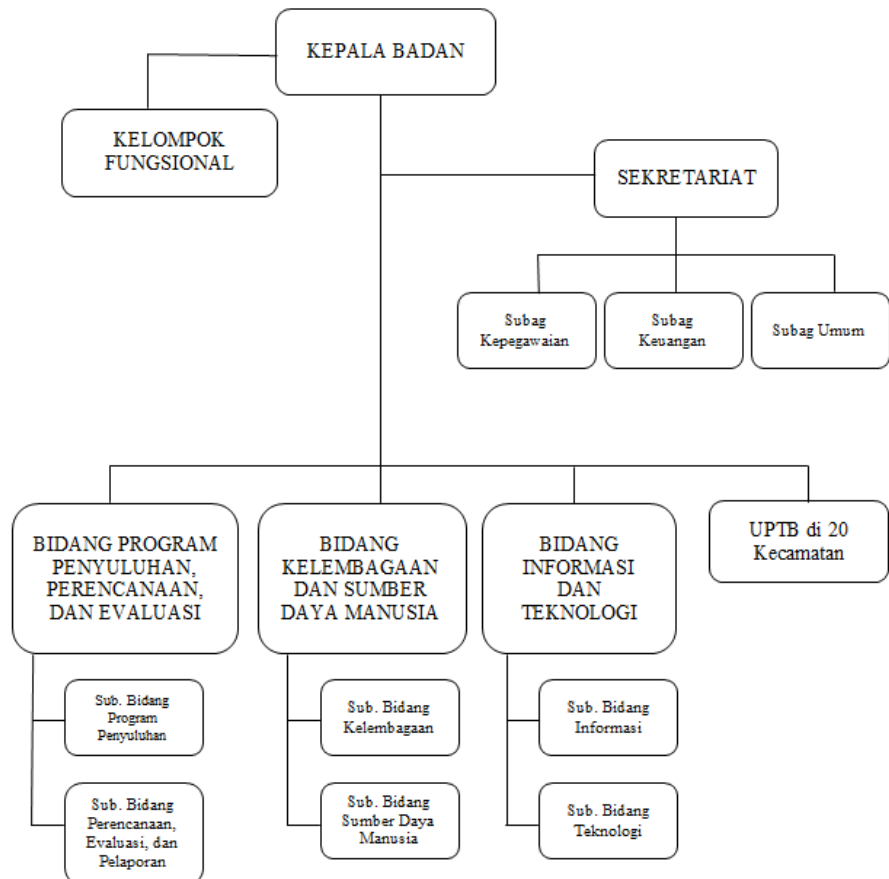
1. Masyarakat tani yang Profesional, adalah masyarakat tani yang dalam usahanya betul-betul menguasai secara keseluruhan apa yang diusahakan, tangguh, produktif, kreatif, dan mampu mengakses serta memanfaatkan potensi dan peluang untuk menghasilkan sesuatu;
2. Masyarakat tani yang Mandiri, adalah masyarakat tani yang mampu menyusun perencanaan dan mengatasi permasalahan;
3. Masyarakat tani yang Sejahtera, adalah masyarakat tani cukup sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan.

b. Tugas, Pokok, dan Fungsi dari Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten Sragen

Bappeluh yang merupakan unsur pelaksana yang dibentuk berdasarkan UU No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Sragen No. 20 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelaksana Penyuluhan Sragen. Bappeluh memiliki tugas pokok sebagai berikut: “melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan”. Dari tugas pokok tersebut, Bappeluh memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam lingkup penyuluhan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Susunan oraganisasi Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) Kabupaten Sragen.



Sumber: Bappeluh Kabupaten Sragen

Gambar 7. Bagan Organisasi Bappeluh Kabupaten Sragen

B. Penyajian Data

1. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian organik di Sragen.

Pengembangan pertanian di Kabupaten Sragen, khususnya padi organik sudah dimulai sejak tahun 2001. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda sebagai berikut:

“Pengembangan padi organik sudah sejak tahun 2001 yang dicetuskan oleh pak Untung, bupati Sragen periode sebelumnya,“ (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Pengembangan ini dimulai pada masa kepemimpinan bupati Untung Wiyono. Dalam perannya untuk pelaksanaan pertanian berkelanjutan, pemerintah daerah dengan cara mengeluarkan kebijakan yang dilaksanakan oleh instansi terkait. Dalam usaha pengembangannya, pemerintah Kabupaten Sragen telah membuat *Road Map* pengembangan padi organik pada tahun 2007. Pembuatan *roda map* diharapkan mampu menjadi acuan dalam proses pengembangannya dalam berbagai bidang yang terkait dengan padi organik.

a. Kebijakan dan program dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang berhubungan dengan pertanian, khususnya padi organik

Pengembangan padi organik di Sragen sudah dilakukan sejak tahun 2001, namun sejak saat itu masih belum ada kebijakan langsung berupa peraturan daerah ataupun keputusan bupati yang secara jelas menyebutkan bahwa Kabupaten Sragen akan menetapkan padi organik untuk dikembangkan. Namun demikian, pengembangan padi organik sendiri sudah masuk dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagai bagian urusan pilihan dalam pertanian. Mengembangkan pertanian organik menjadi salah satu arah kebijakan dalam bidang pertanian. Sasaran dari arah kebijakan tersebut adalah dapat dicapainya Sragen yang memiliki produk unggulan

berupa padi organik dan memiliki pangan yang berkualitas. Sesuai dengan aturan yang ada, pengembangan padi organik diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Bappeluh sebagai SKPD terkait operasional dan teknisnya.

Dalam *road map* pengembangan padi organik, terkait dengan kebijakan yang dilakukan oleh SKPD terkait, dibagi menjadi kebijakan umum dan kebijakan khusus, yang termasuk dalam kebijakan umum:

1. Kebijakan peningkatan kompetensi SDM. Peningkatan SDM di sini adalah terkait dengan aparat yang tangguh yang mampu mendukung pengembangan padi organik, dan menciptakan petani yang unggul sebagai pelaku utama agrobisnis padi organik yang memiliki motivasi tinggi dan kemampuan yang memadai dalam hal teknis maupun penguasaan teknologi.
2. Kebijakan peningkatan koordinasi. Dalam aspek ini, yang menjadi fokus kebijakan adalah terkait dengan manajemen pengelolaan, evaluasi, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan program serta penyelarasan pelaksanaan program pengembangan padi organik.
3. Kebijakan peningkatan kelembagaan petani dan pelaku agrobisnis padi organik. Pelaksanaan penyuluhan diarahkan pada pengembangan kelembagaan petani, baik kelembagaan produksi, irigasi, koperasi, lumbung pangan desa, keuangan, maupun peningkatan motivasi anggota kelompok tani dan pelaku usaha lain dalam pengembangan padi organik.
4. Kebijakan peningkatan nilai tambah bagi produk utama maupun limbahnya melalui pengembangan industri pascapanen. Peningkatan nilai tambah

terhadap beras organik maupun limbahnya menuju produk yang bermutu, bervariasi sesuai dengan permintaan pasar yang dinamis.

Sedangkan yang masuk dalam kebijakan khusus adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan padi organik yang ditujukan pada percepatan pengembangan sarana prasarana usahatani padi organik, pengembangan lembaga keuangan di sentra produksi, pengembangan sarana pengolahan dan sarana pemasaran.
2. Kebijakan pemenuhan penyediaan SDA dalam pengembangan padi organik. Untuk pengembangan padi organik yang berkelanjutan diperlukan ketersediaan SDA baik ketersediaan lahan dan air, sehingga diperlukan kebijakan yang menjamin pengembangan agrobisnis padi organik yang berkelanjutan.
3. Kebijakan pemenuhan penyediaan teknologi dalam pengembangan padi organik. Permintaan pasar yang meningkat pesat dan semakin bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen yang menuntut inovasi teknologi yang selalu berkembang, sehingga dibutuhkan sebuah kebijakan yang menjamin penyediaan teknologi dalam pengembangan agrobisnis tersebut.

Selain itu, dalam *road map* juga dijelaskan mengenai program yang akan dijalankan terkait dengan pengembangan padi organik. Pembuatan program tersebut mencakup pada pertimbangan prospek, potensi, arah, tujuan, dan sasaran. pengarah program tersebut diantaranya:

1. Perluasan areal tanam padi organik. Program ini terkait dengan upaya mengubah lahan sawah biasa yang berpotensi menjadi lahan sawah semi organik dan padi organik.
2. Peningkatan produksi padi organik. Program ini dilakukan dengan upaya:
 - a. Pembangunan dan rehabilitasi tata guna air
 - b. Penyediaan benih padi organik yang bermutu
 - c. Penyediaan dan pendistribusian pupuk padi organik
 - d. Penyediaan dan pendistribusian pupuk organik
 - e. Penambahan dan peningkatan pelayanan UPJA (Unit Pelayanan Jasa Alsintan)
 - f. Fasilitasi pembiayaan sarana pertanian melalui penyediaan dana dan penguatan modal usaha kelompok.
 - g. Pengembangan kelembagaan petani.
3. Pengembangan SDM. Program ini terkait dengan upaya memfasilitasi pengembangan sarana dan prasarana pengembangan SDM dan mendirikan pusat konsultasi agrobisnis padi organik.
4. Penerapan teknologi tepat guna dalam budi daya padi organik dari pembibitan sampai panen. Program ini terkait dengan upaya pengembangan SDM maupun aparat dalam penggunaan teknologi budi daya padi organik.
5. Penerapan teknologi tepat guna pada limbah tanaman padi organik. Program ini dilakukan dengan upaya mengalokasikan anggaran rutin

untuk pembiayaan pengadaan teknologi budi daya padi organik dan pengembangan diversifikasi produksi limbah padi organik.

6. Pembentukan sentra pengolahan limbah tanaman padi organik. Program ini dilakukan dengan upaya memfasilitasi pembentukan sentra pemasaran produk olahan limbah tanaman padi.
7. Pengembangan pasar padi organik dan pasar produk olahan limbah tanaman padi organik dengan memfasilitasi pembentukan jaringan pemasaran yang lebih luas dengan promosi dan pendirian layanan informasi pasar.
8. Pengembangan kemitraan antara petani dengan *stakeholder* dengan memfasilitasi terjalinnya kemitraan antara petani dan *stakeholder*.

Pemerintah Kabupaten Sragen telah memasukkan program pengembangan pertanian organik dalam Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) tahun 2013. Penerapan program tersebut telah disesuaikan dengan instansi terkait. Berikut program RKPD terkait dengan pengembangan padi organik:

1. Mewujudkan peningkatan produksi pupuk organik
2. Bantuan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan (Alat Pengolah Pupuk Organik - APPO)
3. Perluasan lahan yang bersertifikasi
4. Unit pengolah pupuk organik (UPPO)
5. Pelatihan pembuatan pupuk organik
6. Penguatan desa wisata organik
7. Pemanfaatan limbah tebu untuk bahan pupuk organik

Bappeluh merupakan SKPD pelaksana dalam pengembangan padi organik, dalam Renstranya juga mencantumkan kebijakan terkait dengan pengembangan padi organik, di antaranya:

- a) Pembangunan manajemen pembangunan pertanian lintas sektor
- b) Pengembangan kawasan agropolitan
- c) Pembangunan pertanian melalui sistem agrobisnis yang dinamis
- d) Pengembangan sistem pertanian yang berkelanjutan

Selain itu, program yang dimiliki oleh Bappeluh terkait dengan pengembangan padi organik masuk dalam program peningkatan kesejahteraan petani. Padi organik dimasukkan dalam program ini karena dengan menanam padi organik, petani akan meningkatkan kesejahteraannya. Dinas Pertanian dalam programnya, lebih fokus pada kegiatan yang membantu peningkatan lahan pertanian organik yang mendapat sertifikasi. Selain itu, dalam aspek kebijakan umumnya Dinas Pertanian bertujuan untuk mengembangkan sistem pertanian berkelanjutan melalui upaya penetapan lahan pertanian lestari, menjaga kesuburan tanah dengan pertanian organik dan atau pemupukan berimbang, memelihara dan meningkatkan infrastruktur pertanian, penanganan panen pasca panen dan pengendalian hama terpadu. Sedangkan untuk kebijakan teknisnya adalah dengan mendorong budi daya pertanian organik dan penggunaan pupuk berimbang. Berikut penjabaran program dinas pertanian dari Renstra SKPD Dinas Pertanian:

1. Sertifikasi lahan yang dilakukan tiap tahun secara bertahap pada lahan yang telah memenuhi syarat organik
2. Bantuan bibit padi organik

3. Subsidi peternakan (sapi dan kambing) untuk menunjang pembuatan pupuk organik
4. Subsidi pada pupuk organik
5. Menumbuhkan dan meningkatkan penggunaan pupuk organik dengan bantuan alat pengolah pupuk organik melalui Gapoktan

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen saat ini sudah dimasukkan dalam *forum of economic* development, *empowerment*, and *promotion* (Fedep) yang diharapkan mampu membantu pengembangan padi organik, karena yang masuk dalam fedep merupakan ikon andalan suatu daerah. Selain itu, fedep sendiri adalah lembaga yang membantu merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat terkait dengan regulasi. Hal ini sesuai pernyataan Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda sebagai berikut :

“... Sejak tahun 2007, pengembangan padi organik di sragen ikut dalam *forum of economic* development, *empowerment*, and *promotion* (FEDEP) yang merupakan pengembangan ekonomi oleh pemerintah provinsi jawa tengah. FEDEP di kabupaten sragen terbagi menjadi beberapa klaster, padi organik menjadi salah satu klaster di kabupaten sragen.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Masuknya pengembangan padi organik dalam fedep, telah menghasilkan penetapan desa wisata padi organik. Pemerintah yang pengembangan padi organik sebagai potensi wisata dan juga dalam rangka usaha untuk lebih mengenalkan padi organik, klaster padi organik dijadikan oleh pemerintah Kabupaten Sragen sebagai desa wisata. Desa wisata ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sragen No.556/13/002/2012 Tentang Penetapan Desa Wisata Organik Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen. Hal ini sesuai dengan Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda pernyataan sebagai berikut:

“... Selain itu sekarang pengembangannya sudah dalam penetapan sebagai desa wisata Betisrejo yang terdiri dari 3 desa, yaitu desa jamBEan, desa jeTIS, dan desa sukoREJO. Pengembangan desa wisata ini diketuai oleh bapak sugiono dan bapak Hartoyo sebagai sekretarisnya dengan nama Dewi Betisrejo Manajemen.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

b. Pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kabupaten Sragen

Terkait dengan sektor pertanian di Kabupaten Sragen, menjadi tanggungjawab dari Dispertan dan Bappeluh sebagai SKPD pelaku teknis. Arah pengembangan padi organik sesuai dengan *road map* yang telah dibuat, adalah terkait dengan industri hulu sampai hilir termasuk juga pemasarannya, diantaranya:

1. Peningkatan produksi padi organik untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dengan orientasi ekspor.
2. Pengembangan kelembagaan usaha, dan pemodalannya oleh petani, swasta, dan juga pemerintah.
3. Pengembangan usaha pengelolaan pasca panen terhadap padi organik dan limbah padi organik
4. Pengembangan pasar.

Dari pengembangan tersebut, luas lahan yang menanam padi organik terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dengan tabel luas tanam di bawah ini:

Tabel 9. Data luas tanam padi organik Kabupaten Sragen selama 5 tahun ke belakang

NO.	KECAMATAN	2008	2009	2010	2011	2012
		luas lahan	luas lahan	luas lahan	luas lahan	luas lahan
		Ha	Ha	Ha	Ha	Ha
1	SRAGEN	497	1169	1279	1555	1704
2	KARANGMALANG	263	675	703	1521,3	1596
3	SIDOHARJO	475	576	924	796	893
4	MASARAN	140	149	151	181	215
5	KEDAWUNG	255	1615	1397	2081	1788
6	NGRAMPAL	169	110	55	57	120
7	SAMBUNGMACAN	539	845	961	1161	1389
8	GONDANG	254	443	679	653	800
9	SAMBIREJO	794	879	1351	1333	1654
10	TANGEN	20,6	23	20	24,5	30
11	GESI	137,5	205	148	213	255
12	JENAR	46	137	148	89	132
13	MONDOKAN	67	92	65	40	52
14	SUKODONO	260	346	567	613	690
15	SUMBERLAWANG	68	81	78	84	92
16	MIRI	29	30	30	39	54
17	GEMOLONG	87	106	102	59	70
18	KALIJAMBE	86,2	102	92	108	138
19	PLUPUH	114	178	186	184	223
20	TANON	208	202	187	191	218
	Jumlah	4508,8	7963	9123	10983	12113

Sumber: Bappeluh Kabupaten Sragen

Melihat dari pengembangan yang telah dilakukan, maka dapat dibagi menjadi beberapa aspek, adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan aspek yang penting dalam pengembangan padi organik, karena menjadi wadah bagi petani untuk menyampaikan keinginan dan keluhan. Dalam hal ini, Gapoktan merupakan kelembagaan yang langsung berhubungan dengan petani. Usaha yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan pembantuan pembangunan kelembagaan adalah dengan memberikan bantuan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) 1 orang ke setiap desa yang ada di Kabupaten

Sragen. Tugas dari PPL salah satunya adalah membantu penguatan kelembagaan yang dimiliki oleh petani / Gapoktan. Bantuan lain yang diberikan oleh pemerintah daerah adalah dengan membantu dana untuk sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga independen yang berkewenangan memberikan sertifikasi.

Kewajiban petani organik saat ini adalah menjaga kualitas dari padi organik tersebut. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen untuk menjaga kualitas adalah dengan menempatkan PPL yang bertugas untuk mengawasi kegiatan pertanian mulai dari pengolahan tanah, penanaman, pengairan, panen, dan pemasaran yang dicatat dalam *Farm record*. *Farm record* tersebut kemudian yang akan digunakan sebagai bukti kualitas padi organik yang tetap terjaga pada konsumen ataupun distributor.

2. Pemasaran

Pada awal pengembangannya, pemasaran padi organik mengalami kendala, karena produk yang baru dan masih belum terlalu terkenal. Pemerintah yang melihat hal ini, membantu dengan memberlakukan aturan agar semua PNS yang ada di Kabupaten Sragen mengonsumsi padi organik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut :

“ ... PNS juga diwajibkan untuk membeli beras organik sebanyak 5 kg per orang.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Selain hal tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen dalam usaha membantu pemasaran padi organik adalah dengan membentuk asosiasi padi organik, membuat PD PAL (Perusahaan Daerah Padi Alam Lestari) dan juga menggandeng Padi

Mulya sebagai pihak swasta. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

“Dibantu dalam pemasaran pada tahun 2004 melalui: asosiasi, Padi mulya, dan PD PAL (Padi alam lestari).” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Sejalan dengan pendapat di atas, Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda juga menyampaikan sebagai berikut:

“Pemerintah daerah membantu pemasaran dengan BUMD, PD PAL, padi alam lestari. Sebelumnya pada tahun 2004 juga dibantu oleh PT. Gentrade (Sragen Trading)” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Sejalan dengan waktu, saat ini padi organik sudah menjadi ikon dari Kabupaten Sragen dan sudah diikutkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam berbagai pameran pertanian, misalnya saja pameran pertanian di Agro Expo tiap juni di Suropadan(Temanggung), pekan raya jogja dan pekan raya Semarang.

3. SDM

Pengembangan dalam bidang SDM juga dilakukan dengan bantuan PPL. PPL di sini membantu Peningkatan SDM terkait dengan menciptakan petani yang unggul sebagai pelaku utama agrobisnis padi organik yang memiliki motivasi tinggi dan kemampuan yang memadai dalam hal teknis maupun penguasaan teknologi. Selain itu, dari petani sendiri juga terjadi peningkatan pendidikan generasi mudanya.

4. Sarana dan prasarana

Dalam hal sarana dan prasarana, pengembangan yang dilakukan sudah terlihat dengan perbandingan keadaan sebelum dan sesudah adanya padi organik.

Saat ini, petani organik sudah memiliki sarana yang maju dan memadai dengan dimiliki melalui Gapoktan bantuan dari pemerintah berupa alat pertanian. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut :

“Bantuan yang diterima berupa mesin selep, prosesor pupuk, jaringan irigasi, traktor, dan alsintan” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Dari hasil pengembangan tersebut, berikut data hasil panen, produksi dan produktivitas :



Tabel 10. Data luas panen, produksi, dan produktivitas padi organik Kabupaten Sragen 5 tahun ke belakang

NO.	KECAMATAN	2008	2008	2008	2009	2009	2009	2010	2010	2010	2011	2011	2011	2012	2012	2012
		luas panen	produksi	produktivitas	luas panen	produksi	produktivitas	luas panen	produksi	produktivitas	luas panen	produksi	produktivitas	luas panen	produksi	produktivitas
		Ha	kw	kw/ha	Ha	Kw	kw/ha	Ha	kw	kw/ha	Ha	kw	kw/ha	Ha	kw	kw/ha
1	SRAGEN	497	33512,5	67,43	919	44800	48,75	1279	86882,5	67,93	1555	107170,6	68,92	1698	118221	69,62
2	KARANGMALANG	234	14766,6	63,11	675	45027	66,71	703	47290,8	67,27	1521,3	102307,43	67,25	1560	103320	66,23
3	SIDOHARJO	475	37780,2	79,54	549	41998	76,50	924	60115,4	65,06	790	51421,1	65,09	861	56324	65,42
4	MASARAN	122	7169,0	58,76	147	9254	62,95	151	9342,3	61,87	181	11212,95	61,95	190	11610,9	61,11
5	KEDAWUNG	246	18752,0	76,23	1615	124113	76,85	1397	90883	65,06	2081	135327,43	65,03	1729	114342,43	66,13
6	NGRAMPAL	169	11448,2	67,74	76	5073,5	66,76	55	3734	67,89	57	3868,02	67,86	109	7082,87	64,98
7	SAMBUNGMACAN	530	28358,5	53,51	800	48150,4	60,19	961	64905,9	67,54	1153	77862,09	67,53	1362	92425,3	67,86
8	GONDANG	254	17226,0	67,82	492	29175	59,30	679	47719	70,28	643	45003,57	69,99	790	55124,54	69,78
9	SAMBIREJO	794	50010,0	62,98	879	56858	64,68	1286	89977	69,97	1327	90129,84	67,92	1645	113553,89	69,03
10	TANGEN	20	1203,2	60,16	22	1177,8	53,54	20	1116,8	55,84	24,5	1371,76	55,99	30	1872,6	62,42
11	GESI	95	5204,0	54,78	205	10775,5	52,56	148	8098,6	54,72	213	11670,27	54,79	230	12654,97	55,02
12	JENAR	43	2231,6	51,90	112	7496,4	66,93	138	9076	65,77	89	5853,53	65,77	118	7822,86	66,30
13	MONDOKAN	67	2875,6	42,92	92	4203,6	45,69	65	3647,2	56,11	39	2207,01	56,59	52	3293,9	63,34
14	SUKODONO	168	8425,2	50,15	237	10367,4	43,74	567	29971,6	52,86	613	32476,74	52,98	663	36403,4	54,91
15	SUMBERLAWANG	68	3690,0	54,26	80	3769,5	47,12	64	3457,3	54,02	84	4557,84	54,26	80	4353,3	54,42
16	MIRI	29	1549,5	53,43	22	1331	60,50	26	1624,4	62,48	39	2432,82	62,38	54	3432,76	63,57
17	GEMOLONG	87	5276,2	60,65	106	6669,3	62,92	94	6755,4	71,87	59	3152,37	53,43	70	3820,3	54,58
18	KALIJAMBE	86	6373,6	74,55	105	7294,5	69,47	92	5485	59,62	108	6457,32	59,79	127	7453,3	58,69
19	PLUPUH	114	6513,7	57,14	178	10733,5	60,30	183	11390	62,24	184	11461,36	62,29	210	12994	61,88
20	TANON	208	14850,0	71,57	202	12688	62,81	193	11760,6	60,94	191	11618,53	60,83	218	13029	59,77
	Jumlah	4305	277215,53	64,39	7513	480955,40	64,02	9025	593232,8	65,73	10952	717562,58	65,52	11796	779135,3	66,05

Sumber: Bappeluh Kabupaten Sragen

c. Dampak pelaksanaan pengembangan pertanian organik

Ekonomi

Keadaan masyarakat sebelum adanya pengembangan padi organik masih bisa dikatakan kekurangan. Setelah adanya pengembangan padi organik, kehidupan perekonomian masyarakat semakin meningkat. Peningkatan keadaan ekonomi ini secara langsung dapat dilihat dengan keadaan rumah warga yang sudah bertembok, kepemilikan sapi sebagai hewan ternak, dan kepemilikan kendaraan bermotor sebagai alat transportasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

“... yang paling terasa adalah perekonomian masyarakat yang meningkat, dapat dilihat dengan perbandingan sebelum menanam padi organik dan saat ini yang sudah menanam padi organik, karena nilai ekonomis dari beras organik yang lebih tinggi. Ya untuk lebih jelasnya dapat dilihat dengan rumah warga yang sudah bertembok, warga sudah banyak yang punya sapi dan motor hampir di tiap rumah.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Senada dengan pendapat Ali tersebut, Ernal selaku staf bidang ekonomi

Bappeda juga menyampaikan seperti berikut:

“Dengan pengembangan padi organik, khususnya di desa sukorejo, kecamatan sambirejo yang sudah sejak awal mengembangkan, nanti dapat anda lihat rumah penduduk yang sudah bagus. Hal tersebut sudah berbeda jauh saat sebelum adanya pengembangan padi organik di sana.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Selain pernyataan dari Bappeda, Parwoto selaku staf bidang Informasi dan

Teknologi Bappeluh juga setuju dengan menyampaikan pendapat sebagai berikut:

“... Selain itu yang paling terasa adalah perekonomian masyarakat yang meningkat, dapat dilihat dengan perbandingan sebelum menanam padi organik dan saat ini yang sudah menanam padi organik, karena nilai ekonomis dari beras organik yang lebih tinggi.” (Wawancara pada 3 Juni 2013, di Bappeluh Kabupaten Sragen)

Lingkungan

Dengan adanya padi organik ini pemerintah mengharapkan terjadi perbaikan lingkungan, karena dalam pengembangan padi organik ini tidak menggunakan bahan kimia dan hanya memanfaatkan bahan organik dari alam. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda sebagai berikut:

“Ini merupakan salah satu cara yang kita lihat untuk memperbaiki lingkungan.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Dari pendapat di atas, beliau juga menambahkan sebagai berikut :

“Terkait dengan dampak lingkungan, itu dapat kita lihat dengan pertanian yang tidak lagi menggunakan bahan kimia, jadi pertanian organik itu lebih aman dan ramah pas lingkungan. Dampak sosialnya misalnya terkait dengan kelembagaan dan masyarakat yang mau mengembangkan harus bersama-sama, karena dalam pengembangan pertanian organik ini tidak bisa dengan metode yang sporadis, dan harus serempak.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Sejalan dengan pendapat di atas, dampak yang dirasakan dengan perbaikan lingkungan yang dikarenakan adanya pertanian organik adalah petani dapat menanam tanpa menggunakan pupuk sebanyak 3 kali masa tanam dan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

“ ... saking baiknya unsur hara tanah, bisa dilakukan 3 kali penanaman Padi tanpa menggunakan pupuk. Dari segi kesehatan, petani saat ini makin sehat dan tidak mudah sakit.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Menambahkan manfaat pengembangan padi organik bagi lingkungan, Parwoto selaku staf bidang Informasi dan Teknologi Bappeluh menyampaikan sebagai berikut:

“Pada awal organik, produksi akan turun sampai 20%, tapi setelahnya akan terus meningkat yang dikarenakan perbaikan lingkungan sebagai dampak yang dapat dirasakan warga sekitar dengan peningkatan kesuburan dan perbaikan struktur tanah pertanian”. (Wawancara pada 3 Juni 2013, di Bappeluh Kabupaten Sragen)

Sosial

Keberadaan pengembangan padi organik juga telah menumbuhkan kemandirian masyarakat. Kemandirian masyarakat ini tercermin dari kelembagaan petani melalui Gapoktan juga semakin maju, karena Gapoktan telah menjadi wadah yang menyalurkan padi organik ke distributor ataupun konsumen. Selain itu, dapat dilihat juga dengan perkembangan kemampuan masyarakat untuk terus mengembangkan diri dengan analisis usaha tani. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

“ ... petani makin lama makin pandai untuk menganalisis usaha tani, hasil pertanian dahulu habis hanya untuk operasional, tapi setelah menjadi organik panen terus meningkat sampai sekarang petani sudah menikmati hasil pertanian.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Selain itu, Ali juga menambahkan dalam pengembangan padi organik menyebabkan masyarakat harus lebih terbuka pada dunia luar, karena dengan adanya pengembangan padi tersebut akan membuat daerah lain untuk melakukan kunjungan dan belajar tentang padi organik. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sejak ada pengembangan padi organik, kita mendapat banyak mendapat kunjungan, seperti dari belgia, berbagai daerah di Indonesia, dan langkat. Selain itu kehidupan sosial semakin bagus, dan pendidikan masyarakat meningkat” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Sejalan dengan pendapat Ali di atas, Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda juga menambahkan

“Dampak sosialnya misalnya terkait dengan kelembagaan dan masyarakat yang mau mengembangkan harus bersama-sama, karena dalam pengembangan pertanian organik ini tidak bisa dengan metode yang sporadis, dan harus serempak.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen terkait dengan aspek sosial dapat dilihat dari peningkatan dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat selama 5 tahun. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 11 IPM Kabupaten Sragen

Tahun	IPM
2011	71,33
2010	71
2009	70,27
2008	69,57
2007	68,98

Sumber: Pembangunan Manusia Provinsi Jateng (menegpp.go.id/ipm/jateng)

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pertanian organik

Dalam pelaksanaan pengembangan padi organik akan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang mendukung, ada pula yang menghambat, dan faktor tersebut berasal dari diri sendiri (internal) maupun dari pihak luar (eksternal). Dari beberapa faktor tersebut maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang membantu dalam pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen. Faktor pendukung berasal dari internal dan eksternal, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor internal

a) Kelembagaan

Kelembagaan merupakan faktor internal yang mendukung keberlangsungan pengembangan padi organik. Kelembagaan terdiri dari pihak pemerintah melalui Bappeluh, Dinas Pertanian, dan BUMD PD PAL, sedangkan dari petani sendiri melalui Gapoktan. Pembentukan PD PAL ini adalah untuk membantu pemasaran hasil dari petani padi organik. Peran PD PAL dahulu sangat signifikan, namun saat ini PD PAL sedang dalam masa dibekukan karena ada masalah internal. Berikut pernyataan Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda terkait dengan hal di atas:

“Pemerintah daerah membantu pemasaran dengan BUMD, PD PAL, padi alam lestari. Namun saat ini PD PAL sedang dibekukan karena masalah internal.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Pembekuan dari PD PAL sendiri saat ini sudah tidak terlalu berpengaruh besar, karena petani sudah berkembang dan tidak kesulitan lagi dalam pemasaran. Peran dari Dinas Pertanian juga membantu dalam hal perbaikan irigasi dan pemberian bantuan sarana produksi padi. Selain itu, Bappeluh juga memiliki peran yang signifikan. Peran Bappeluh adalah terkait dengan tanggung jawab pada PPL. PPL merupakan bagian dari Bappeluh, sehingga peningkatan kualitas PPL menjadi bagian tanggungjawabnya.

Keberadaan Gapoktan sendiri dalam pengembangan padi organik terasa sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan kelembagaan dalam Gapoktan sudah ada sejak lama dan masih terus berjalan sampai sekarang. Sehingga, mampu mempermudah dalam pengembangan padi organik. Berikut pernyataan Ali Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur terkait dengan hal tersebut:

“Kita dalam kelembagaan Gapoktan sudah kuat, karena kita sudah ada sejak tahun 1991 dan melakukan pertemuan rutin sekali seminggu, sehingga kita tetap kompak.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

b) Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah faktor yang juga dapat mendukung terjadinya pengembangan padi organik. Kesadaran masyarakat muncul karena kesadaran akan pentingnya memperbaiki lingkungan dan berharap dengan pengembangan padi organik dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat di sini, pemerintah menggunakan PPL yang bertugas langsung mendampingi tiap desa. Jadi, pada awalnya peran PPL di sini sangat penting, karena harus mampu mempengaruhi masyarakat untuk menanam padi organik.

Setelah petani merasakan hasil dari pengembangan padi organik, saat ini petani tidak ragu lagi dan semakin bersemangat untuk mengembangkan padi organik dengan bantuan bahan alami. Berikut pernyataan dari Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur tentang pemanfaatan alam dalam pelaksanaan pertanian organik:

“Dengan adanya pertanian padi organik, ternak juga harus organik dan makan pakan organik. Dahulu sampai tahun 2005, kita membeli pupuk dan ternak dari perusahaan swasta limbah hijau. Selain itu kita juga mendapat bantuan pinjaman ternak dari Dinas Peternakan. Dengan adanya PPL, kita diajari untuk membuat pestisida dan pupuk organik sampai sekarang dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Dengan kita punya ternak, untuk pakannya kita menanam rumput sutaria. Menanam mentik wangi, C4 raja, dan merah Thailand sebagai andalan dan beras hitam dalam tahap pengembangan.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Senada dengan pernyataan tersebut, Ernal selaku staf bidang ekonomi

Bappeda juga menyatakan bahwa:

“kesadaran masyarakat akan pertanian padi organik juga mendukung dapat dikembangkannya padi organik di Sragen.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Dari pernyataan tersebut sesuai dengan jumlah petani yang menanam padi organik terus meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan data di bawah ini:

Tabel 12. Jumlah petani dan Kelompok tani Kabupaten Sragen

NO.	KECAMATAN	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2012
		poktan	petani	poktan	petani	poktan	petani	poktan	petani	poktan	petani
1	SRAGEN	15	240	32	769	33	896	33	1673	48	2486
2	KARANGMALANG	26	268	33	392	35	444	35	1390	42	1842
3	SIDOHARJO	44	432	45	653	35	705	49	595	56	1112
4	MASARAN	12	141	13	152	13	150	17	284	19	478
5	KEDAWUNG	15	362	65	1532	85	1658	84	2621	94	3422
6	NGRAMPAL	16	228	19	198	19	57	19	57	22	103
7	SAMBUNGMACAN	39	377	52	886	53	943	61	1068	73	1478
8	GONDANG	14	213	35	619	39	893	45	784	58	1427
9	SAMBIREJO	25	477	25	1252	24	1252	24	1242	27	1693
10	TANGEN	7	39	10	44	10	47	12	55	14	132
11	GESI	8	213	17	165	18	112	34	221	42	389
12	JENAR	7	241	20	346	30	473	11	476	19	662
13	MONDOKAN	18	179	17	170	13	129	21	67	25	227
14	SUKODONO	24	382	33	689	46	884	53	1289	60	1683
15	SUMBERLAWANG	16	83	19	92	19	101	19	101	22	186
16	MIRI	8	98	20	90	23	66	18	180	24	427
17	GEMOLONG	31	144	39	310	42	336	20	80	32	207
18	KALIJAMBE	15	97	20	115	21	127	31	167	39	249
19	PLUPUH	21	163	25	215	25	216	25	226	29	417
20	TANON	22	451	22	382	22	374	22	375	23	452
	Jumlah	383	4828	561	9071	605	9863	633	12951	768	19072

Sumber: Bappeluh Kabupaten Sragen

c) Ketersediaan lahan pertanian

Lahan pertanian yang dibutuhkan dalam pengembangan padi organik harus berupa tanam hamparan yang berarti pola tanam padi organik harus serempak dalam satu luasan. Hal di atas sesuai dengan pernyataan Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

“... Lahannya yang dimaksud untuk menanam padi organik harus hamparan dan serempak.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Sejalan dengan pernyataan Ali di atas, berikut cuplikan pernyataan dari Parwoto selaku staf bidang Informasi dan Teknologi Bappeluh:

“... dalam penanamannya harus hamparan, dan tidak boleh spot-spot.” (Wawancara pada 3 Juni 2013, di Bappeluh Kabupaten Sragen)

Luas wilayah Kabupaten Sragen adalah 941.36 km² atau 94151,36 hektar.

Pemanfaatan lahan tersebut tidak semua sama, berikut pembagaian pemanfaatan lahan di Kabupaten Sragen:

Tabel 13. Luasan pemanfaatan lahan Kabupaten Sragen

No.	Jenis Penggunaan Tanah	Luas (Ha)	%	% dr Luas Sawah
1.	Perkampungan/Pekarangan/Industri	23317,27	24,8	
2.	Sawah Irigasi Teknis	17254,851	18,3	43,52
3.	Sawah Irigasi ½ Teknis	3685,7573	3,91	9,28
4.	Sawah Irigasi Sederhana	2681,7635	2,85	6,77
5.	Sawah Tadah Hujan	16037,241	17	40,43
6.	Pertanian Tanah Kering (Tegalan)	19242,218	42,1	
7.	Hutan	5421,41	20,4	
8.	Perkebunan	853,89	5,76	
9.	Tambak/Kolam	33,24	0,91	
10.	Padang Rumput/Semak	49,88	0,03	
11.	Lain-lain (jalan/sungai)	5576,8395	0,05	
	Jumlah	94151,36		

Data diolah, Sumber: BPN Kab Sragen

Pada tahun 2001 penanaman padi organik di Kabupaten Sragen dimulai dengan 2 hektar di Kecamatan Sambirejo, dan secara bertahap sudah meningkat hingga sekarang sudah mencapai 7000 hektar yang terdiri dari padi organik dan semi-organik yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Sragen. Selain itu, dalam usaha untuk meningkatkan hasil padi organik dengan memperluas area tanam padi organik, Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur akan bekerjasama dengan Gapoktan sekitar yang masih belum menanam padi organik. Hal ini sesuai dengan pernyataannya sebagai berikut:

“Petani organik harus bisa mengembangkan analisa usaha tani, dengan memperhitungkan luas lahan dan hasil panen yang akan didapat. Untuk meningkatkan produksi, saat ini siap untuk mengembangkan 45 hektar lagi bekerjasama dengan Gapoktan tetangga karena sedang bersiap untuk tahun 2014 ekspor ke Jepang” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

2) Faktor Eksternal

a) Pengembangan Teknologi

Pengembangan teknologi menjadi salah satu pendukung pengembangan pertanian organik. Teknologi yang dimaksud adalah peralatan yang membantu mempermudah kegiatan pertanian. Teknologi yang menjadi faktor eksternal yang mampu mendukung pengembangan padi organik adalah teknologi yang berasal dari pihak akademisi. Kedekatan Pemkab Sragen dengan institut pendidikan, menjadi faktor pendukung tersendiri karena pemkab Sragen dapat memanfaatkan teknologi dari sana. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Ernal sebagai berikut:

“Selain itu, salah satu modal yang terasa adalah kedekatan dan hubungan baik antara pemerintah daerah dengan pihak akademisi dari berbagai universitas ternama sehingga kita dapat mengambil ilmu dan teknologi dari sana” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Sama halnya dengan pendapat di atas, Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur juga menyampaikan sebagai berikut:

“untuk penggunaan teknologi baru, kunjungan dari universitas yang belajar di sini telah banyak membantu kita, selain itu internet menjadi salah satu sumber inspirasi” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

b) Peran swasta

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen, selain peran dari pemerintah dan petani, juga membutuhkan peran dari pihak swasta. Peran yang diberikan oleh swasta bisa dengan banyak hal, misalnya saja investor, bantuan kerja sama, dan sebagai distributor. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur sebagai berikut:

Dengan adanya pertanian padi organik, ternak juga harus organik dan makan pakan organik. Dahulu sampai tahun 2005, kita membeli pupuk dan ternak dari perusahaan swasta limbah hijau. Selain itu kita juga mendapat bantuan pinjaman ternak dari Dinas Peternakan. Dengan adanya PPL, kita diajari untuk membuat pestisida dan pupuk organik sampai sekarang dengan memanfaatkan apa yang ada di alam sekitar kita. Dengan kita punya ternak, untuk pakannya kita menanam rumput sutaria. Menanam mentik wangi, C4 raja, dan merah Thailand sebagai andalan dan beras hitam dalam tahap pengembangan. (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Padi Mulya merupakan salah satu swasta sangat membantu dalam pemasaran padi organik di Sragen sejak awal, karena padi mulya dan PD PAL sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah untuk membantu pemasaran padi organik yang dihasilkan oleh petani. berikut pernyataan Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda terkait Dengan bantuan pemasaran dari pihak swasta:

Pemerintah daerah membantu pemasaran dengan BUMD, PD PAL, padi alam lestari. Namun saat ini PD PAL sedang dibekukan karena masalah internal. Sebelumnya pada tahun 2004 juga dibantu oleh PT. Gentrade(Sragen Trading). (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Sepakat dengan pernyataan di atas, Parwoto selaku staf bidang Informasi dan Teknologi Bappeluh juga menyampaikan sebagai berikut:

“Sesuai dengan prosedur, kita harus berkoordinasi dengan instansi lain, diantaranya: Kerjasama dengan Dinas Peternakan terkait dengan pengadaan dan perawatan ternak, dengan Dinas Pertanian membuat sekolah lapang (SL) pengolahan hasil, dengan Bappeda dalam promosi dan pembantuan pemasaran, misal: Pekan Raya Pertanian Suropadan Agro Expo, dengan Padi Mulya (swasta) dalam pemasaran, dan juga dengan Asosiasi petani padi organik untuk membantu pemasaran.”(Wawancara pada 3 Juni 2013, di Bappeluh Kabupaten Sragen)

Senada dengan pendapat di atas, Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur juga menyampaikan sebagai berikut:

Dibantu dalam pemasaran pada tahun 2004 melalui: asosiasi, Padi mulya, dan PD PAL (Padi alam lestari). Selain itu, PNS juga diwajibkan untuk membeli beras organik sebanyak 5 kg per orang. (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

b. Faktor penghambat

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sendiri, selain faktor yang mendukung di atas, juga ada faktor yang menghambat atau kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1) Faktor internal

Kendala faktor dari pengembangan padi organik oleh pemerintah, juga mengalami kendala dari internal. Kendala yang dihadapi dari internal adalah sebagai berikut:

a) Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan menjadi faktor penghambat dalam pengembangan Pertanian padi organik. Hal ini dikarenakan kegiatan manusia yang semakin kompleks, dan mengalihkan fungsi lahan persawahan untuk kegiatan industri, pemukiman, ataupun yang lainnya.

Permasalahan terkait alih fungsi lahan di Kabupaten Sragen dalam prosesnya, terkait dengan beberapa instansi pemerintah. Berikut pernyataan dari Padiyono selaku Kabag Produksi Padi, Palawija, dan Perlindungan Tanaman mengenai proses alih fungsi lahan:

“yang menjadi masalah kita adalah dalam urusan alih fungsi lahan, dimana Dinas Pertanian hanya menyuguhkan data tentang luas lahan, produktifitas lahan, dan jenis tanaman. Karena dinas pertanian masuk dalam tim pertimbangan alih fungsi lahan yang di koordinatori oleh dinas tata ruang, dan kita tidak memiliki wewenang untuk memutuskan.” (Wawancara pada 30 Mei 2013, di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen)

Selain pernyataan di atas, beliau juga menyampaikan tentang alih fungsi lahan untuk pembangunan jalan tol sebagai berikut:

“Selain itu, saat ini kita sudah berkoordinasi dengan instansi lain terkait akan dilakukannya alih fungsi lahan seluas 200 hektar untuk pembangunan jalan tol tahun ini.” (Wawancara pada 30 Mei 2013, di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen)

Berbeda dengan pendapat di atas, Ernal menyampaikan bahwa:

“masalah alih fungsi lahan, Kabupaten Sragen bisa dibilang tidak terlalu parah, karena tidak ada alih fungsi yang masif” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Alih fungsi lahan yang ada di Kabupaten Sragen selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 14. Alih fungsi lahan per kecamatan selama 5 tahun ke belakang

NO.	KECAMATAN	2008	2009	2010	2011	2012
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah
		(M ²)	(M ²)	(M ²)	(M ²)	(M ²)
1	SRAGEN	500	0	9100	0	24040
2	KARANGMALANG	8435	150	7030	5980	56905
3	SIDOHARJO	0	76200	4183	14824	3781
4	MASARAN	8790	39228	225	7945	2000
5	KEDAWUNG	500	0	0	1100	8705
6	NGRAMPAL	0	10605	8795	0	18968
7	SAMBUNGMACAN	0	82065	0	4761	0
8	GONDANG	0	0	7390	6830	0
9	SAMBIREJO	0	0	907	6658	0
10	TANGEN	0	0	0	0	2000
11	GESI	0	2390	0	0	0
12	JENAR	0	0	0	0	0
13	MONDOKAN	0	0	0	0	0
14	SUKODONO	805	0	2520	0	0
15	SUMBERLAWANG	0	0	0	0	2115
16	MIRI	0	0	0	0	0
17	GEMOLONG	4120	3515	4530	5560	4015
18	KALIJAMBE	0	0	2095	289215	0
19	PLUPUH	105	0	440	0	804
20	TANON	1700	1700	0	0	4595
	Jumlah	24955	215853	47215	342873	127928

Daya Keterbatasan Kemampuan SDM

Kesadaran SDM untuk menanam dan mengembangkan padi organik saja tidak cukup tanpa didukung adanya kemampuan dari SDM tersebut untuk menanam padi organik. Keterbatasan kemampuan sendiri masih menjadi kendala dalam usaha penanaman padi organik. Usia petani yang rata-rata sudah tua, saat ini masih belum ada regenerasi yang baik, karena petani tersebut jarang memperbolehkan anaknya menjadi petani dan lebih mendorong untuk kerja di sektor lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ernal sebagai berikut:

“Kesadaran SDM untuk menanam dan mengembangkan padi organik sudah baik. Namun permasalahan mengenai SDM masih terkait dengan regenerasi, karena banyak Siantar petani yang menginginkan anaknya bekerja di sektor lain.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Selain permasalahan regenerasi, pendidikan SDM yang rendah menjadi permasalahan. Usaha pemerintah untuk mengatasi keterbatasan kemampuan petani adalah dengan mendayagunakan PPL untuk memberikan pendampingan pada petani. Selain itu, PPL sendiri juga ditingkatkan kemampuannya dengan diberikan pelatihan oleh pemerintah.

c) Pemerataan Sarana dan Prasarana

7000 an hektar luas lahan yang telah ditanami padi organik dan semi-organik, tidak semuanya memiliki sarana dan prasarana yang sama. Hal ini nampak langsung di lapangan. Beberapa petani sudah mendapatkan bantuan yang memadai dan ada juga yang belum mendapatkan bantuan secara maksimal. Sejauh ini, bantuan pemerintah melalui Dinas Pertanian sudah diberikan pas petani terkait dengan pengembangan padi organik. Berikut pernyataan terkait dengan bantuan yang telah disampaikan oleh Padiyono selaku Kabag Produksi Padi, Palawija, dan Perlindungan Tanaman:

“Ada beberapa bantuan yang diberikan terkait dengan kegiatan produksi, misalnya saja (1) bantuan kegiatan optimalisasi dengan memberikan bantuan sarana produksi, (2) Jaringan irigasi menjadi salah satu focus penanganan Dinas Pertanian dalam bantuan tiap tahun yang diberikan terkait dengan bantuan sarana irigasi, misalnya saja tahun ini untuk yang di sukorejo, sambirejo sebesar 50 juta pada 50 hektar dan tahun 2012 sebesar 125 juta untuk 125 hektar, (3) Pemasaran saat ini kita membantu penanganan pemesanan dari Jakarta, bandung, jatim, dan pesanan local dari satker yang dikolektifkan dan pembayarannya kontan, (4) Pihak Dinas Pertanian juga membantu promosi, saat ini padi organik ikut sebagai unggulan kabupaten sragen dan sering ikut pameran, seperti: Agro Expo tiap juni di Suropadan(Temanggung), pekan raya jogja dan pekan raya semarang., (5) bantuan alat seperti traktor dan yang lainnya” (Wawancara pada 30 Mei 2013, di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen)

Namun dalam pembagian bantuan tersebut masih belum merata. Ketimpangan sarana dan prasarana tersebut lebih terlihat dengan sarana irigasi, selain itu salah seorang petani menyatakan bahwa:

“Padi organik sudah mulai kita tanam, tapi kendala yang dihadapi terkait dengan irigasi yang masih perlu diperbaiki lagi” (Wawancara pada 9 Juni 2013, di Kec Sambirejo, Kab Sragen)

Pendapat di atas berbeda dengan pernyataan dari Ali tentang bantuan yang diterima dari pemerintah, sebagai berikut:

“Bantuan yang diterima berupa mesin selep, prosesor pupuk, jaringan irigasi, traktor, dan alsintan” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

2) Faktor eksternal

Selain faktor internal tersebut, juga ada faktor eksternal yang juga berpengaruh dalam pengembangan padi organik, diantaranya:

a) Keterbatasan teknologi

Teknologi yang ada dalam pengolahan hasil pertanian saat ini sudah maju. Kemajuan teknologi ini untuk mempermudah dalam pengolahan hasil pertanian, namun tidak semua teknologi dapat dimiliki oleh petani yang disebabkan keterbatasan modal petani untuk membeli teknologi itu dan mahalnya harga teknologi tersebut. Sehingga, keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam pengembangan padi organik, padahal dengan pemanfaatan teknologi yang maju dapat meningkatkan nilai ekonomi dari hasil panen tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah seorang petani sebagai berikut:

“Hasil panen biasanya langsung saya jual, selain itu sebagian diambil untuk saya pakai sendiri.” (Wawancara pada 9 Juni 2013, di Kec Sambirejo, Kab Sragen)

b) Penggunaan obat-obatan / pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan.

Penggunaan obat-obatan / pupuk yang mengandung bahan kimia adalah penyebab dari sebuah pertanian dapat dikatakan sebagai pertanian organik atau tidak. Penggunaan bahan kimia sejak revolusi hijau pada masa orde baru sudah di luar batas kewajaran dan telah merusak struktur tanah pertanian. Pertanian organik secara langsung maupun tidak langsung mewajibkan petani untuk meninggalkan penggunaan bahan kimia dalam kegiatan pertanian. Sehingga dalam penggunaan bahan kimia saat ini sudah mulai harus dikurangi. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Parwoto selaku staf bidang Informasi dan Teknologi Bappeluh:

“Tanah pertanian saat ini sudah rusak, dan untuk memperbaikinya dibutuhkan waktu yang lama. Kerusakan ini dikarenakan dulu kita menggunakan pupuk dan obat-obatan kimia. Memang dengan penggunaan obat dan pupuk kimia menghasilkan hasil panen yang berlimpah, tapi dampaknya kita rasakan sekarang dengan keadaan pertanian yang menurun.” (Wawancara pada 3 Juni 2013, di Bappeluh Kabupaten Sragen)

Sejalan dengan pengembangan pertanian organik sejak tahun 2001, untuk mengatasi permasalahan mengenai bahan kimia pada pertanian, petani secara bertahap sudah mulai mengurangi penggunaan bahan kimia dan beralih menggunakan pupuk dan pestisida organik. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ali sebagai berikut:

“Pelaksanaan dari awal ke organik: pestisida di hapus dulu, pupuk kimia dikurangi secara bertahap ke organik selama minimal 9 kali masa tanam, hasil akan menurun dan mulai menjadi organik. Minimal butuh waktu 3 tahun untuk menjadi organik.” (Wawancara pada 4 Juni 2013, di Desa Sukorejo, Kec Sambirejo, Kab Sragen)

3. Potensi pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen

Perencanaan pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen merupakan tanggung jawab dari Bappeda. Perencanaan dapat dilakukan melalui beberapa metode dengan melihat faktor yang berpengaruh pada tiap metode tersebut, diantaranya:

a) Pengembangan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh

Pengembangan dari pertanian organik yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sragen tidak hanya dilakukan dengan sembarangan. Sejak awal pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen, Pemkab sudah memperhitungkan faktor-faktor yang ada untuk membantu pengembangannya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda Kabupaten Sragen :

“Dalam usaha untuk mengembangkan padi organik, sejak awal kita tidak sekedar menanam. Kita lakukan dengan memperhitungkan apa saja yang berpengaruh pada pengembangan padi organik itu.” (Wawancara pada 29 Mei 2013, di Bappeda Kabupaten Sragen)

Sejalan dengan pendapat di atas, Padiyono selaku Kabag Produksi Padi, Palawija, dan Perlindungan Tanaman juga berpendapat sebagai berikut:

“Pengembangan padi organik yang awalnya merupakan tanggung jawab dari Dinas Pertanian, kita harus memperhitungkan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan padi organik.” (Wawancara pada 30 Mei 2013, di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen)

b) Pengembangan wilayah yang berpotensi

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen masih belum sepenuhnya organik murni. Padi organik murni hanya ada di Kecamatan Sambirejo dan yang lainnya masih *semi*-organik. Secara bertahap, padi yang *semi*-organik

tersebut sudah banyak yang menjadi padi organik. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Padiyono selaku Kabag Produksi Padi, Palawija, dan Perlindungan Tanaman juga berpendapat sebagai berikut:

Pengembangan padi organik yang awalnya merupakan tanggung jawab dari Dinas Pertanian, kita harus memperhitungkan semua hal yang berkaitan dengan pengembangan padi organik. Untuk yang benar-benar murni padi organik difokuskan pada sambirejo, yang lainnya semi organik. Untuk peran dinas pertanian dibagi menjadi beberapa bagian yang punya kewenangan sendiri-sendiri sesuai dengan tupoksi. (Wawancara pada 30 Mei 2013, di Dinas Pertanian Kabupaten Sragen)

C. Analisis Data

1. Peran pemerintah daerah dalam pengembangan pertanian organik di Sragen.

Kabupaten Sragen sudah mengembangkan padi organik sejak tahun 2001. Pengembangan padi organik bertujuan untuk melaksanakan pertanian berkelanjutan oleh Pemkab Sragen. Pengembangan padi organik sudah masuk sebagai bagian dalam urusan pilihan pertanian. Dalam usaha pengembangannya, pemerintah Kabupaten Sragen telah mengeluarkan berbagai kebijakan dan telah membuat *Road Map* pengembangan padi organik pada tahun 2007.

a. Kebijakan dan program dari Pemerintah Kabupaten Sragen yang berhubungan dengan pertanian, khususnya padi organik

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen yang dilakukan sejak tahun 2001, langsung diinstruksikan oleh bupati dan langsung dimasukkan dalam RPJMD hingga sekarang. Namun, sampai sekarang masih belum ada kebijakan langsung berupa peraturan daerah ataupun keputusan bupati yang secara jelas tentang pengembangan padi organik. Masuknya padi organik dalam RPJMD

menjadikan pengembangannya sebagai salah satu arah kebijakan dalam bidang pertanian dengan sasaran Sragen yang memiliki produk unggulan berupa padi organik dan memiliki pangan yang berkualitas. Sesuai dengan aturan yang ada, pengembangan padi organik diserahkan kepada Dinas Pertanian dan Bappeluh sebagai SKPD operasional dan teknisnya. Pada tahun 2007, Dinas Pertanian telah membuat *road map* untuk pengembangan padi organik. Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sudah masuk dalam Fedep yang telah membantu menghasilkan penetapan desa wisata padi organik di Kecamatan Sambirejo dengan Keputusan Bupati Sragen No. 556/13/002/2012 Tentang Penetapan Desa Wisata Organik Kawasan Agropolitan Kecamatan Sambirejo Kabupaten Sragen.

Pelaksanaan peran dari pemerintah dalam pengembangan pertanian berkelanjutan melalui instansi terkait, sesuai dengan pendapat dari Litchfield dalam Syafiie yang menyatakan bahwa badan pemerintahan diorganisasikan, dilengkapi dengan tenaga-tenaganya, dibiayai, digerakkan, dan dipimpin. Selain itu, keberadaan pengembangan padi organik sudah sesuai dengan Rostow, bahwa pembangunan dalam bidang pertanian yang memegang peranan penting harus mampu membantu pertumbuhan ekonomi di pedesaan, termasuk di dalamnya non-pertanian di pedesaan. Penerapan padi organik di Kabupaten Sragen juga sudah sesuai dengan UU No 41 th 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, karena telah memenuhi konsep dari pertanian berkelanjutan itu sendiri. Selain itu, pembuatan kebijakan dan skema penerapan pengembangan padi organik sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Fajrin (2010) bahwa peran pemerintah daerah harus mampu melakukan perannya sebagai *Entrepreneur*

dengan BUMD pembuatan PD PAL, Koordinator dengan membuat kebijakan mengusulkan strategi berupa *road map*, Fasilitator dengan peran Dispartan, dan Bappeluh sebagai SKPD pelaksana, dan Stimulator dengan mengeluarkan Keputusan Bupati Sragen No. 556/13/002/2012 yang bertujuan mampu meningkatkan promosi tentang padi organik di Kabupaten Sragen.

Jadi, dari hasil penelitian yang telah didapatkan dapat disimpulkan bahwa pemerintah Kabupaten Sragen telah membuat kebijakan pengembangan padi organik dengan mengeluarkan peraturan, namun peraturan tersebut dirasa masih kurang karena masih berupa Peraturan Bupati dan belum berupa Perda. Selain itu, terkait program pengembangan padi organik sudah bagus, karena sudah dibuat *road map* yang dapat digunakan sebagai acuan. Dukungan lain yang sangat membantu adalah terkait dengan masuknya pengembangan padi organik sebagai penerapan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan dalam RPJMD Kabupaten Sragen, karena dapat digunakan dasar oleh SKPD pelaksana teknis dalam membuat program dan memberikan bantuan pada petani.

b. Pelaksanaan pengembangan pertanian organik di Kabupaten Sragen

SKPD yang bertanggungjawab pada sektor pertanian di Kabupaten Sragen adalah Dinas Pertanian dan Bappeluh. Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sudah ada *road map* yang digunakan sebagai panduan dalam pengembangannya. *Road map* tersebut telah mencakup pada teknis, industri hulu sampai hilir, dan juga pemasarannya. Tujuan dari pembuatan Road map tersebut adalah untuk meningkatkan produksi padi organik, pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha kelola pasca-panen, dan pengembangan pasar. Aspek yang

dikembangkan adalah kelembagaan petani dengan bantuan PPL, pemasaran padi organik yang diperluas, kemampuan SDM petani dan PPL dalam memberikan pelatihan pada petani, dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung, maupun tidak langsung pada pengembangan padi organik.

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sesuai dengan teori dari Jaya (2004), bahwa sudah memenuhi komponen partisipasi, keanekaragaman, integrasi, dan perspektif jangka panjang, sedangkan komponen pemerataan masih belum tercapai karena belum semua daerah mendapatkan fasilitas yang sama dalam usaha pengembangan padi organik. Selain itu, mengacu pada pendapat Sutamihardja (dalam Jaya, 2004), pengembangan padi organik sudah sesuai dengan pemerataan manfaat hasil, pengamanan terhadap kelestarian sumber daya alam, dan telah membantu mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Jadi, dalam pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen sudah berjalan dengan baik dengan dukungan dari semua pihak. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pertanian telah membuat *road map* yang digunakan sebagai acuan yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan pertanian yang ada.

c. Dampak pelaksanaan pengembangan pertanian organik

Dampak yang ditimbulkan dari pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen harus memperhatikan perkembangan dari aspek yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan atau konsep *triple bottom line* dari Elkington, yaitu ekonomi (*profy*), lingkungan (*planet*), dan sosial (*people*). Aspek tersebut diantaranya:

- a) Ekonomi : Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen telah meningkatkan perekonomian masyarakat. Peningkatan perekonomian ini ditunjukkan dengan kondisi rumah yang lebih baik, kepemilikan hewan ternak, dan kepemilikan kendaraan oleh masyarakat seperti yang disampaikan oleh Ali selaku ketua klaster pengembangan padi organik dan ketua Gapoktan Sri Makmur dan didukung oleh pendapat dari Ernal selaku staf bidang ekonomi Bappeda dan juga Parwoto staf bidang Informasi dan Teknologi Bappeluh. Sesuai dengan pendapat dari Elkington, *profit* hampir selalu menjadi tujuan utama dalam pembangunan, dan sudah dikatakan tercapai.
- b) Lingkungan : Dampak pada lingkungan yang ditimbulkan oleh keberadaan pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen terasa dengan pengurangan yang signifikan pada penggunaan bahan kimia dalam pertanian, selain itu kesehatan dari masyarakat juga meningkat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Ernal. Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan dari Ali terkait dengan perbaikan lingkungan yang dikarenakan adanya pertanian organik yang dapat dirasakan petani dengan menanam tanpa menggunakan pupuk sebanyak 3 kali masa tanam dan kualitas kesehatan masyarakat yang meningkat. Pengaruh perbaikan lingkungan dengan padi organik juga disampaikan oleh Parwoto terkait dengan kesuburan tanah yang terbaharui dan peningkatan panen pertanian. Bila disesuaikan dengan konsep *triple bottom line* aspek *planet* dapat dikatakan juga sudah memenuhi, karena telah mengalami perbaikan, dan pengembangan padi organik harus dilakukan di daerah yang telah memenuhi persyaratan dalam pertanian organik.

c) Sosial : Dampak yang terkait dengan aspek sosial dalam pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen terkait dengan kemandirian masyarakat melalui Gapoktan sebagai kelembagaan petani. Gapoktan di sini memiliki fungsi yang sangat signifikan, hal ini ditunjukkan dengan Gapoktan sebagai wadah yang menyalurkan padi organik ke distributor ataupun konsumen, selain itu juga digunakan untuk meningkatkan diri dengan analisis usaha tani. Ali juga menyampaikan kalau pengembangan padi organik menyebabkan masyarakat harus lebih terbuka pada dunia luar, karena dengan adanya pengembangan padi tersebut akan membuat daerah lain untuk melakukan kunjungan dan belajar tentang padi organik. Kesesuaian dampak pada aspek sosial ini sudah memenuhi aspek *people* dari Elkington, karena masyarakat telah menjadi subjek dalam kegiatan pembangunan.

Pengembangan padi organik juga telah meningkatkan kemampuan petani dalam penggunaan teknologi baru yang ramah lingkungan. Pengembangan padi organik juga telah mampu menjawab 5 dari 10 tantangan utama administrasi pembangunan menurut Siagian (1994:18), diantaranya: 1) Tanggungjawab social; 2) Pelestarian lingkungan hidup; 3) Peningkatan mutu hidup; 4) Keanekaragaman tenaga kerja; dan 5) Penguasaan dan pemanfaatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, kriteria yang dimaksud oleh SEARCA dalam (Budiasa, 2011:26) tentang pertanian berkelanjutan telah dipenuhi, diantaranya: 1) Keberadaan padi organik telah membantu mewujudkan kelayakan ekonomi; 2) Pengembangan yang diiringi dengan perbaikan lingkungan; 3) Adil secara sosial yang terwujud; 4) Padi organik cocok dan selaras dengan budaya setempat; dan 5)

Sistem pengembangan padi organik tersebut telah berbasis pengetahuan yang holistik/komprehensif/multi-disiplin serta mempertimbangkan interaksi dinamis antar aktivitas *on-farm*, *off-farm*, dan *non-farm* (*system and holistic approach*). Pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen juga sesuai dengan pendapat dari Shepherd (dalam Budiasa, 2011:26) pertanian berkelanjutan memiliki 3 prinsip dasar. Diantaranya:

1. Membuang metode produksi *input* yang lebih ramah lingkungan, efektif, produktif, dan murah.
2. Melibatkan lebih banyak petani serta menghargai dan memahami kearifan lokal dalam pengelolaan pertanian dan sumberdaya alam.
3. Melaksanakan konservasi sumberdaya aktif, yang terintegrasi dalam kerangka sistem produksi.

Jadi, dampak yang ditimbulkan dari pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sudah sesuai dengan pembangunan berkelanjutan, karena telah meningkatkan perekonomian dan sosial masyarakat dengan menjaga lingkungan.

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan pertanian organik

Dalam pelaksanaan pengembangan padi organik akan ada banyak faktor yang mempengaruhi. Ada yang mendukung, ada pula yang menghambat, dan faktor tersebut berasal dari diri sendiri (*internal*) maupun dari pihak luar (*eksternal*). Dari beberapa faktor tersebut maka dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang membantu dalam pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen. Faktor pendukung berasal dari internal dan eksternal, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Faktor internal

a) Kelembagaan

Kelembagaan adalah faktor utama dalam pengembangan padi organik. Gapoktan sebagai lembaga yang dimiliki petani, sedangkan pemerintah dalam kelembagaan pendukung pengembangan padi organik melalui Bappeluh, Dinas Pertanian, dan PD PAL. Dinas Pertanian dan Bappeluh sebagai SKPD pelaksana teknis, dan PD PAL untuk membantu pemasaran hasil dari petani padi organik. Namun saat ini PD PAL sedang dibekukan karena masalah internal dan saat ini sudah tidak terlalu berpengaruh dengan pemasaran, karena petani sudah dapat memasarkan sendiri hasil padi organiknya.

Faktor kelembagaan adalah modal untuk membantu petani dalam mengembangkan padi organik, selain itu mengutip dari dalam Nasrul (2012) bahwa kelembagaan juga mampu untuk membantu petani dalam mengatasi kesulitan menjual hasil panen. Hal ini telah diterapkan pada Gapoktan yang ada di desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo dengan menggunakan Gapoktan sebagai 1 pintu untuk menjual padi organik dari petani. Selain itu pemerintah juga telah melakukan peran Koordinasi yang dikemukakan oleh Fajrin (2010) dengan menggunakan Dinas Pertanian, Bappeluh, dan PD PAL.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah aspek kelembagaan petani sudah kuat dan memiliki pengaruh yang besar dalam pengembangan pertanian

berkelanjutan. Kelembagaan pemerintah juga berhasil mendukung pengembangan dengan PD PAL, Dinas Pertanian, Bappeluh, dan PD PAL. Daerah yang akan mengemabangkna pertanian berkelanjutan harus menguatkan aspek kelembagaan yang ada pada petani dan pemerintah.

b) Kesadaran masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah faktor yang juga dapat mendukung terjadinya pengembangan padi organik. Kesadaran masyarakat terkait dengan kesadaran akan pentingnya perbaikan lingkungan dan potensi pada padi organik yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di sini, pemerintah menggunakan PPL dari Bappeluh untuk mempromosikan dan membantu masyarakat dalam mengembangkan padi organik. Kesadaran masyarakat akan manfaat dari padi organik sudah dapat dilihat dengan perkembangannya yang semakin luas.

Kesadaran masyarakat merupakan faktor penentu dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Hal ini sudah tercantum UU No 41 Th 2009 Tentang Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pasal 35, ayat 2, huruf F bahwa Peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, menurut (Budiasa, 2011:57), pertanian berkelanjutan sendiri harus mampu memanfaatkan sumberdaya yang ada di sekitar petani. Berbagai teknologi penggunaan sumberdaya lokal dapat diaplikasikan untuk pengembangan sistem pertanian berkelanjutan.

Kesimpulan yang didapat adalah kesadaran petani di Kabupaten Sragen sudah mulai tumbuh tentang pertanian yang berkelanjutan. Kesadaran tersebut tidak lepas dari peran PPL yang telah disiapkan oleh Bappeluh untuk memberikan pendampingan pada petani.

c) **Ketersediaan lahan pertanian**

Pada awal pengembangan padi organik hanya dengan 2 hektar saja, sejalan dengan waktu maka luas lahan padi organik bertambah sampai 7000 hektar. Potensi pengembangan padi organik di Sragen sangat potensial, karena Kabupaten Sragen memiliki luas lahan sawah 33% dari luas wilayahnya atau 40.000 an hektar. Selain itu, dengan permintaan pasar yang terus meningkat, maka lahan pertanian untuk pengembangan padi organik terus ditambah dari yang sebelumnya lahan padi konvensional.

Ketersediaan lahan merupakan salah satu pendukung dalam pengembangan pertanian berkelanjutan itu sendiri dan dalam usaha perbaikan lingkungan. Penetapan UU No 41 Th 2009 salah satunya bertujuan untuk melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan dan melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani untuk meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.

Jadi, ketersediaan lahan dapat dikatakan sebagai pendukung dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Data yang telah dimiliki bisa menjadi acuan bahwa luas lahan pertanian yang masih konvensional di Kabupaten Sragen merupakan potensi. Selain itu, pengubahan lahan menjadi berkelanjutan merupakan penerapan dari UU No 41 Th 2009 dan harus didukung oleh pemerintah.

2) **Faktor Eksternal**

a) **Pengembangan Teknologi**

Pengembangan teknologi sebagai faktor pendukung adalah terkait dengan dukungan kunjungan dari akademisi yang membawa ilmu dan peralatan baru pada petani di Kabupaten Sragen. Ilmu dan peralatan tersebut dapat diterapkan pada

pengembangan padi organik. Hal tersebut dikarenakan kedekatan Pemkab Sragen dengan institut pendidikan yang menjadi faktor pendukung tersendiri.

Kebutuhan akan teknologi yang ramah lingkungan dalam pertanian berkelanjutan adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Perkembangan teknologi yang semakin maju terkait pembuatan pupuk organik, konservasi tanah, dan pengelolaan sumberdaya lain adalah dukungan pada proses pertanian berkelanjutan (Budiasa, 2011:57). Sesuai dengan UU No 41 th 2009 tentang “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” pasal 30 ayat 4 diwajibkan adanya penelitian untuk pengembangan teknologi. Dalam pengembangan tersebut membutuhkan peran dari akademisi.

Kesimpulan yang didapat dari penelitian terkait dengan teknologi sebagai faktor pendukung adalah keberadaan perkembangan teknologi ramah lingkungan menjadi potensi yang dapat diterapkan untuk membantu pengembangan pertanian berkelanjutan. Hal ini menjadi potensi yang dapat dimaksimalkan oleh Pemkab Sragen melalui hubungan mereka dengan pihak akademis.

b) Peran swasta

Swasta memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sejak awal. Peran swasta yang dimaksud di sini adalah sebagai investor, pasar, dan kerja sama. Dalam peran sebagai pasar, pemerintah menggandeng Padi Mulya untuk membantu memasarkan padi organik. Selain itu, lembah hijau adalah swasta yang berkerjasama dengan petani dalam hal pengadaan pupuk organik dan ternak pada awal pengembangan padi organik.

Hornby (1995) dalam Iqbal (2007) mengemukakan bahwa pengembangan pertanian berkelanjutan, swasta adalah salah satu pihak yang terlibat, karena

memiliki andil dalam sektor pertanian. Swasta juga memiliki peran sebagai penunjang dalam pengembangan pertanian berkelanjutan melalui perannya dalam pemasaran dan menjalin kerja sama.

Jadi, swasta merupakan pihak yang memiliki peran yang cukup penting dalam membantu pengembangan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Hal ini ditunjukkan dengan perannya dalam mendistribusikan hasil dari pertanian berkelanjutan pada pasar, selain itu pemerintah juga sudah berperan aktif dalam menggandeng swasta sebagai penunjang dalam pengembangan pertanian berkelanjutan.

b. Faktor penghambat

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen sendiri, selain faktor yang mendukung di atas, juga ada faktor yang menghambat atau kendala dalam pelaksanaannya, diantaranya:

1) Faktor internal

Kendala faktor dari pengembangan padi organik oleh pemerintah, juga mengalami kendala dari internal. Kendala yang dihadapi dari internal adalah sebagai berikut:

a) Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan masih menjadi faktor penghambat dalam pertanian. Alih fungsi lahan disebabkan karena kebutuhan manusia untuk pemukiman dan yang lainnya. Di Kabupaten Sragen sendiri, alih fungsi lahan juga terjadi setiap tahunnya pada lahan sawah. Dinas Pertanian di Kabupaten Sragen sendiri dalam urusan alih fungsi lahan, masuk sebagai bagian dari tim pertimbangan yang memberikan data

tentang luas, produktifitas lahan, dan jenis tanaman yang ditanam, sehingga tidak punya wewenang dalam penentuan keputusan.

Dalam mengatasi alih fungsi lahan, pemerintah telah mengeluarkan UU No 41 Th 2009 tentang “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan”. Keberadaan peraturan tersebut diharapkan mampu mengurangi alih fungsi lahan pertanian. Pada pasal 35 ayat 1 dijelaskan bahwa Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan pada setiap orang yang terkait pemanfaatan lahan, dengan koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi, dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat .

Jadi, alih fungsi lahan masih menjadi kendala serius dalam pengembangan pertanian berkelanjutan. Hal ini dikarenakan alih fungsi lahan berbanding lurus dengan pertumbuhan manusia yang kebutuhannya akan perumahan dan industri semakin meningkat dan hanya bisa dikurangi. Dalam usaha mengurangi alih fungsi lahan, pemerintah sudah mengeluarkan UU No 41 Th 2009 Tentang “Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan” namun dalam kenyataannya peraturan ini masih belum kurang efektif dalam mengurangi alih fungsi lahan yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Sragen.

b) Keterbatasan kemampuan SDM

Keterbatasan SDM yang menjadi kendala adalah terkait dengan pendidikan yang dimiliki oleh petani, karena rata-rata pendidikan dari petani yang ada di Kabupaten Sragen terbatas pada SMA. Selain itu, melihat dari usia petani, proses regenerasi masih belum maksimal. Hal ini juga disebabkan petani yang menginginkan anaknya menjadi pegawai sektor formal dan lainnya. Kendala terkait

PPL juga harus ada peningkatan kualitas dan kemampuannya dalam menguasai teknologi terbaru.

UU No 32 Th 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Menurut Tjahja (2011)

Dalam usaha penerapannya perlu adanya kemampuan yang memadai dari petani, demi mengurangi kerusakan pada lingkungan saat ini dan kemudian hari. Pelaksanaan produksi bersih dalam pembangunan berkelanjutan, dengan kemampuan SDM yang memadai akan menekan hasil limbah. Kendala SDM lebih banyak terjadi karena kurangnya manajemen puncak, lemahnya komunikasi intern, struktur organisasi yang kaku, pendidikan yang rendah, dan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM.

Jadi, keterbatasan kemampuan SDM masih menjadi kendala di Kabupaten Sragen. Dalam usaha untuk mengatasinya, Pemkab Sragen dapat melakukannya dengan memberikan pelatihan pada PPL dan petani untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan dalam penguasaan teknologi yang baru. Selain itu, komitmen dari *top management* harus benar-benar ditingkatkan dan dijaga.

c) Pemerataan Sarana dan Prasarana

Petani yang menanam padi organik, tidak semua memiliki sarana yang sama. Jaringan irigasi yang terlihat di lapangan terlihat jelas kalau tidak semua daerah memiliki sarana yang sama. Sarana pengolahan hasil padi yang baik melalui sudah dimiliki melalui Gapoktan, selain itu juga masih ada petani yang belum

punya sarana pengolahan hasil panen. Sebenarnya bantuan dari pemerintah sudah disalurkan melalui Dinas Pertanian, tapi terkendala jumlah masih terbatas pada beberapa saja dan belum memenuhi semua petani dengan bantuan yang diberikan berupa: (1) sarana produksi, (2) Jaringan irigasi, dan (3) bantuan alat seperti traktor dan yang lainnya.

Pemerataan masih menjadi salah satu kendala dalam pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Sragen, hal ini sesuai dengan Jaya (2004) bahwa pemerataan adalah salah satu komponen dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini dikarenakan suatu pembangunan berkelanjutan adalah yang menjamin pemerataan dan keadilan sosial dengan berorientasi pada tercapainya pemerataan dan keadilan sosial. Senada dengan pendapat itu, Sutamihardja (dalam Jaya, 2004) juga menjelaskan salah satu sasaran pembangunan berkelanjutan adalah Pemerataan manfaat hasil-hasil pembangunan dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang wajar dalam kendali ekosistem atau sistem lingkungan serta diarahkan pada sumberdaya alam.

Kesimpulan yang dapat diambil mengenai kendala dalam pemerataan sarana dan prasarana adalah di Kabupaten Sragen masih belum merata. Hal ini terlihat dengan perbedaan dari keadaan sarana petani yang sama-sama mengembangkan padi organik. Hal ini secara tidak langsung dapat menumbuhkan kecemburuan sosial antar petani. dalam usaha untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan memberikan bantuan secara merata pada petani dengan menggunakan anggaran prioritas pada daerah yang sarananya masih kurang.

2) Faktor eksternal

Selain faktor internal tersebut, juga ada faktor eksternal yang juga berpengaruh dalam pengembangan padi organik, diantaranya:

a) Keterbatasan teknologi

Keterbatasan teknologi yang dimiliki oleh petani masih menjadi kendala dalam pengembangan padi organik. Keterbatasan ini disebabkan oleh mahalanya teknologi tersebut bila dibandingkan dengan hasil yang diperoleh petani. misalnya saja, penggunaan teknologi bisa digunakan untuk membantu dalam pengolahan hasil pertanian. Sehingga, keterbatasan teknologi menjadi kendala dalam pengembangan padi organik, padahal dengan pemanfaatan teknologi yang maju dibutuhkan untuk meningkatkan nilai ekonomi dari hasil panen padi organik.

Kendala akan keterbatasan teknologi yang dialami oleh petani di Kabupaten Sragen sesuai dengan pendapat Siagian (1994:18) tentang penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang menjadi tantangan utama dalam pembangunan. Selain itu, tujuan penggunaan teknologi untuk produksi bersih menurut Tjahja (2011:134) menyebabkan pengembangan sistem informasi mengenai ilmu dan teknologi pengolahan terbatas, dan juga sarana produksi yang rendah dan kurangnya informasi produksi bersih masih menjadi kendala.

Jadi, dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi masih belum dapat berpengaruh pada pertanian berkelanjutan di Kabupaten Sragen. Hal ini dikarenakan mahalanya teknologi yang ada, khususnya pada teknologi pengolah hasil pertanian. Padahal dengan adanya teknologi pengolah dapat membantu petani untuk meningkatkan nilai ekonomi dari padi hasil pertanian.

b) Penggunaan obat-obatan / pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan

Penggunaan obat-obatan / pupuk yang mengandung bahan kimia menjadi penghambat dari pertanian berkelanjutan, khususnya padi organik di Kabupaten Sragen. Sisa obat dan pupuk kimia dari masa revolusi hijau, masih terasa sampai sekarang dan perlu perbaikan dengan waktu yang lama. Petani dan pemerintah Kabupaten Sragen sepakat bahwa usaha untuk mengatasinya harus dilakukan secara bertahap dengan menggunakan pupuk dan pestisida organik.

Pertanian berkelanjutan memanfaatkan sumber daya untuk proses produksi pertanian dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan seminimal mungkin. Penggunaan bahan kimia merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan, dan proses produksi pertanian yang berkelanjutan akan lebih mengarah pada penggunaan produk hayati yang ramah terhadap lingkungan. Dari segi ekonomi menurut Tjahja (2011) penggunaan bahan kimia akan mengurangi nilai ekonomis dari produk pertanian. Sedangkan menurut SEARCA dalam (Budiasa, 2011:26), pertanian organik harus bersifat ramah lingkungan.

Jadi, kesimpulan yang didapat terkait dengan kendala pada penggunaan bahan kimia adalah lebih condong pada limbah rumah tangga yang mengandung bahan kimia. Hal ini dikarenakan petani yang sudah menerapkan pertanian berkelanjutan dengan padi organik sudah berusaha berkomitmen untuk memperbaiki unsur tanah dengan tidak menggunakan pupuk kimia lagi. Namun yang masih menjadi ancaman adalah penggunaan obat atau pestisida kimia yang masih belum ditemukan alternatifnya sejak revolusi hijau.

3. Potensi pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen

1) Pengembangan berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh

Analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, And Threat*) adalah metode yang digunakan untuk melihat dan mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) dalam suatu kebijakan atau usaha. Penerapan SWOT adalah dengan cara menganalisis dan memilah berbagai faktor yang kemudian dikelompokkan ke dalam empat kategori tersebut ([id.wikipedia.org/ AnalisisSWOT](http://id.wikipedia.org/AnalisisSWOT)). Berikut penerapan analisis SWOT pada pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen:

Kekuatan (*Strengths*)

1. Kelembagaan petani; Keberadaan Gapoktan, Dinas Pertanian, Bappeluh, dan PD PAL
2. Keberadaan PPL; Merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan dari pengembangan padi organik, karena setiap desa ada PPL.
3. Kesadaran masyarakat; Kesadaran ini terkait dengan pengetahuan masyarakat pada masyarakat dari pengembangan padi organik.
4. Dukungan kebijakan pemerintah; Dukungan yang diberikan berupa kebijakan dan program bantuan.
5. Kedekatan pemerintah dengan akademisi; Membantu dalam penerapan ilmu dan teknologi baru.
6. Padi organik yang sudah tersertifikasi; Sertifikasi menjadi syarat mutlak untuk mendapat predikat organik.

Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Keterbatasan modal; Keterbatasan modal di sini adalah modal yang dimiliki oleh petani dalam melakukan pengembangan padi organik.
2. Pendidikan dan kemampuan SDM yang masih rendah; Pendidikan yang dimaksud adalah pendidikan formal yang dimiliki oleh petani yang rata-rata pendidikan tertingginya SMA dan keterampilan dalam mengembangkan padi organik yang perlu ditingkatkan.
3. Teknologi pengolahan hasil pertanian yang masih belum canggih; Penggunaan teknologi yang masih terbatas dengan teknologi yang belum maju ataupun dengan teknologi tradisional.
4. Belum meratanya sarana yang dimiliki petani; Keberadaan sarana pendukung dari pengembangan padi organik yang masih belum merata oleh semua petani.

Peluang (*Opportunities*)

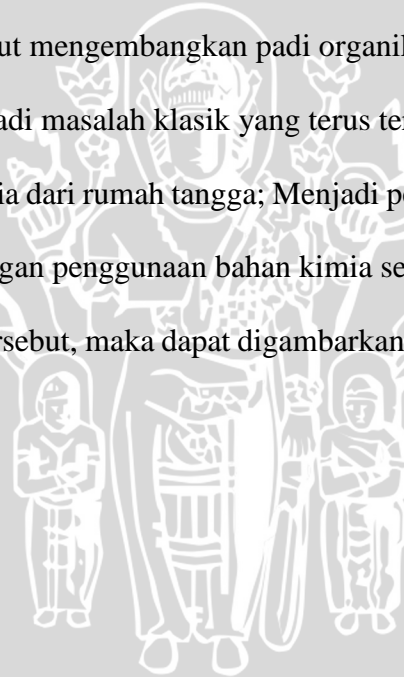
1. Pasar yang masih terbuka dengan permintaan terus meningkat; Permintaan beras organik saat ini masih tinggi, dan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan kesadaran masyarakat akan lingkungan dan kesehatan.
2. Penerapan sebagai desa wisata yang bisa membantu promosi; Dengan dikeluarkannya Kepbup tentang desa wisata padi organik, diharapkan dapat meningkatkan kunjungan dari masyarakat luar dan membantu dalam promosi ke daerah asal.
3. Hasil panen yang terus meningkat; Dapat dilihat dari hasil panen yang tiap tahun terus meningkat.

4. Peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat; Pengembangan padi organik juga telah berhasil membantu memperbaiki lingkungan dan meningkatkan kesehatan jasmani masyarakat.

Ancaman (*Threats*)

1. Biaya operasional yang tinggi; Biaya yang digunakan untuk penanaman tidak sedikit, selain itu pelatihan untuk meningkatkan kualitas dari PPL juga harus diadakan.
2. Pesaing yang semakin banyak; Pengembangan padi organik mendorong daerah atau petani lain untuk ikut mengembangkan padi organik.
3. Alih fungsi lahan; Menjadi masalah klasik yang terus terjadi tiap tahun.
4. Pencemaran limbah kimia dari rumah tangga; Menjadi permasalahan yang harus diatasi dengan pengurangan penggunaan bahan kimia seperti detergen.

Dari penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan menjadi tabel seperti di bawah ini:



Tabel 15. SWOT pengembangan padi organik Kabupaten Sragen

Eksternal	Peluang (<i>Opportunities</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasar yang masih terbuka dengan permintaan terus meningkat; 2. Penerapan sebagai desa wisata yang bisa membantu promosi 3. Hasil panen yang terus meningkat 4. Peningkatan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat 	Ancaman (<i>Threats</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya operasional yang tinggi 2. Pesaing yang semakin banyak 3. Alih fungsi lahan 4. Pencemaran limbah kimia dari rumah tangga 	
Internal	Kekuatan (<i>Strengths</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelembagaan petani; 2. Keberadaan PPL; 3. Kesadaran masyarakat; 4. Dukungan kebijakan pemerintah; 5. Kedekatan pemerintah dengan akademisi; 6. Padi organik yang sudah tersertifikasi. 	Strategi memakai kekuatan untuk memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan optimalisasi produksi padi organik dengan memperluas lahan yang ditanami dan memanfaatkan penelitian dari pihak akademisi 2. Mengoptimalkan keberadaan faktor yang membantu promosi padi organik 	Strategi memakai kekuatan untuk mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan penelitian dari akademisi untuk menekan biaya produksi dan menjaga kualitas padi organik yang telah ada 2. Menjaga kesadaran masyarakat agar tidak merusak lingkungan
	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>) <ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan modal; 2. Pendidikan dan kemampuan SDM yang masih rendah; 3. Teknologi pengolahan hasil pertanian yang masih belum canggih; 4. Belum meratanya sarana yang dimiliki petani; 	Strategi menanggulangi kelemahan dengan memanfaatkan peluang <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan bantuan modal bagi petani 2. Meningkatkan kemampuan SDM 3. Penggunaan teknologi yang mampu meningkatkan nilai ekonomi padi organik 	Strategi memperkecil kelemahan dan mengatasi ancaman <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga mutu padi organik 2. Mengoptimalkan kegiatan pertanian organik

2) Pengembangan wilayah yang berpotensi

Potensi antar wilayah kecamatan dapat diketahui dengan menghitungnya dari beberapa faktor. Perhitungan yang digunakan adalah dengan metode *Scalling*, dengan melihat aspek yang terkait dalam pengembangan padi organik. Rumus yang digunakan dalam perhitungan *scalling* adalah sebagai berikut :

$$Scalling = \frac{X_n - X_{min}}{X_{max} - X_{min}} \times 100$$

Keterangan : X_n = Daerah yang akan dicari skalanya
 X_{min} = Daerah dengan skala terendah
 X_{max} = Daerah dengan skala tertinggi

Dari perhitungan yang dilakukan, akan menghasilkan skala antara 0 sampai 100 yang dapat dibedakan menjadi 5 klasifikasi. Di mana klasifikasi 1 merupakan daerah yang paling berpotensi, dan klasifikasi 5 adalah daerah yang kurang berpotensi. Di antaranya sebagai berikut:

Tabel 16. Klasifikasi hasil *scalling*

Skala	Klasifikasi
100-80	1
80-60	2
60-40	3
40-20	4
20-0	5

Sumber: Ismani

Pengembangan padi organik di Kabupaten Sragen dalam perhitungannya melihat pada aspek sebagai berikut:

1. Potensi lahan produksi; adalah perhitungan *scalling* dengan melihat perbandingan luas lahan yang memproduksi padi organik dengan luas lahan yang ada pada suatu kecamatan. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Potensi lahan produksi} = \frac{\text{Luas lahan produksi}}{\text{Luas lahan total}}$$

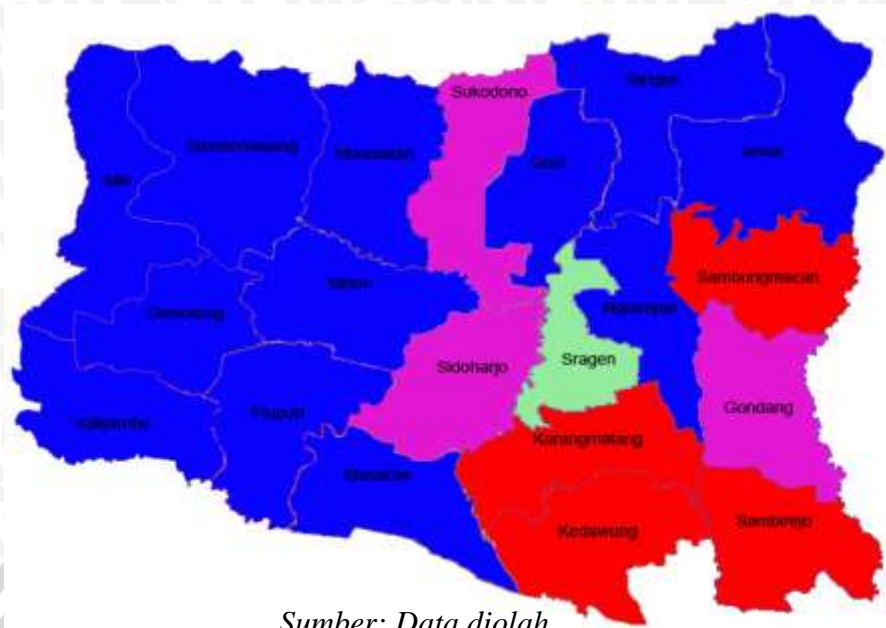
Dari perhitungan data dengan rumus di atas, menghasilkan sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil *Scalling* potensi lahan produksi

NO.	KECAMATAN	Lahan produksi	Lahan total	Rasio	Skala	Klasifikasi
1	SRAGEN	1704	2727	0,625	100,00	1
2	KARANGMALANG	1596	4298	0,371	59,07	3
3	SIDOHARJO	893	4590	0,195	30,53	4
4	MASARAN	215	4404	0,049	7,00	5
5	KEDAWUNG	1788	4978	0,359	57,11	3
6	NGRAMPAL	120	3440	0,035	4,75	5
7	SAMBUNGMACAN	1389	3848	0,361	57,40	3
8	GONDANG	800	4117	0,194	30,49	4
9	SAMBIREJO	1654	4843	0,342	54,26	3
10	TANGEN	30	5513	0,005	0,00	5
11	GESI	255	3958	0,064	9,52	5
12	JENAR	132	6396	0,021	2,45	5
13	MONDOKAN	52	4936	0,011	0,82	5
14	SUKODONO	690	4555	0,151	23,58	4
15	SUMBERLAWANG	92	7516	0,012	1,10	5
16	MIRI	54	5381	0,010	0,74	5
17	GEMOLONG	70	4023	0,017	1,93	5
18	KALIJAMBE	138	4696	0,029	3,87	5
19	PLUPUH	223	4836	0,046	6,57	5
20	TANON	218	5100	0,043	6,02	5

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa Kecamatan Sragen memiliki potensi tertinggi, karena rasio pada kecamatan tersebut hasilnya paling tinggi bila dibanding dengan daerah yang lain. Kecamatan yang memilki potensi terendah dalam hal potensi lahan produksi adalah Kecamatan Tangen. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah

Gambar 8. Hasil *scalling* potensi lahan produksi

Ket :	Warna	Klasifikasi
		1
		2
		3
		4
		5

- Intensitas tanam; adalah perhitungan *scalling* dengan melihat perbandingan luas panen padi dengan luas sawah yang ada pada suatu kecamatan. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Intensitas tanam} = \frac{\text{Luas panen padi}}{\text{Luas sawah}}$$

Dari perhitungan *scalling* data dengan rumus di atas, menghasilkan gambaran sebagai berikut:

Tabel 18. Hasil *Scalling* potensi intensitas tanam

NO.	KECAMATAN	luas lahan	luas panen	Rasio	Skala	Klasifikasi
1	SRAGEN	1704	1698	0,099648	97,30	1
2	KARANGMALANG	1596	1560	0,097744	82,71	1
3	SIDOHARJO	893	861	0,096417	72,53	2
4	MASARAN	215	190	0,088372	10,85	5
5	KEDAWUNG	1788	1729	0,096700	74,70	2
6	NGRAMPAL	120	109	0,090833	29,72	4
7	SAMBUNGMACAN	1389	1362	0,098056	85,10	1
8	GONDANG	800	790	0,098750	90,42	1
9	SAMBIREJO	1654	1645	0,099456	95,83	1
10	TANGEN	30	30	0,100000	100,00	1
11	GESI	255	230	0,090196	24,84	4
12	JENAR	132	118	0,089394	18,69	5
13	MONDOKAN	52	52	0,100000	100,00	1
14	SUKODONO	690	663	0,096087	70,00	2
15	SUMBERLAWANG	92	80	0,086957	0,00	5
16	MIRI	54	54	0,100000	100,00	1
17	GEMOLONG	70	70	0,100000	100,00	1
18	KALIJAMBE	138	127	0,092029	38,89	4
19	PLUPUH	223	210	0,094170	55,31	3
20	TANON	218	218	0,100000	100,00	1

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa ada beberapa kecamatan yang menjadi nilai rasio maksimal, yaitu Kecamatan Tangen, Mondokan, Miri, Gemolong, dan Tanon. Sedangkan Kecamatan Sumberlawang menjadi daerah yang memiliki potensi terendah dalam potensi intensitas tanam.. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah

Gambar 9. Hasil scalling potensi intensitas tanam

Ket :	Klasifikasi
	1
	2
	3
	4
	5

3. Produktivitas lahan; adalah perhitungan *scalling* dengan melihat perbandingan produksi padi dengan luas lahan yang panen pada suatu kecamatan.

Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Produktivitas lahan} = \frac{\text{Produksi padi}}{\text{Luas lahan panen}}$$

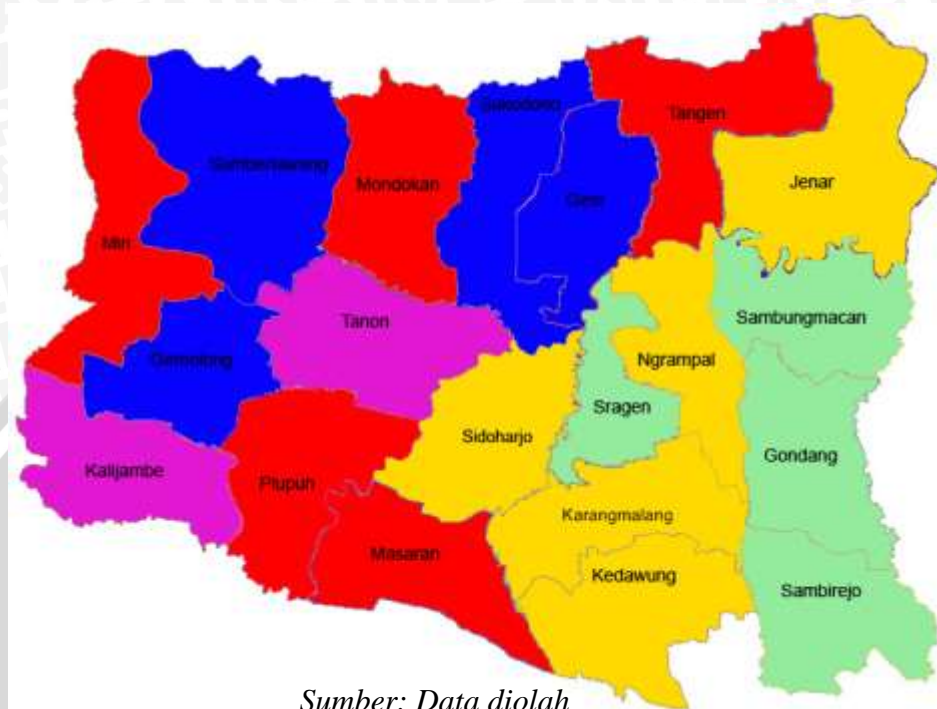
Dari perhitungan *scalling* data dengan rumus di atas, maka dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil *Scalling* potensi produktivitas lahan

NO.	KECAMATAN	Luas panen	Produksi	Rasio	Skala	Klasifikasi
1	SRAGEN	1698	118221	0,696	99,00	1
2	KARANGMALANG	1560	103320	0,662	76,91	2
3	SIDOHARJO	861	56324	0,654	71,61	2
4	MASARAN	190	11610,9	0,611	43,57	3
5	KEDAWUNG	1729	114342,43	0,661	76,27	2
6	NGRAMPAL	109	7082,87	0,650	68,77	2
7	SAMBUNGMACAN	1362	92425,3	0,679	87,51	1
8	GONDANG	790	55124,54	0,698	100,00	1
9	SAMBIREJO	1645	113553,89	0,690	95,13	1
10	TANGEN	30	1872,6	0,624	52,10	3
11	GESI	230	12654,97	0,550	3,94	5
12	JENAR	118	7822,86	0,663	77,33	2
13	MONDOKAN	52	3293,9	0,633	58,12	3
14	SUKODONO	663	36403,4	0,549	3,20	5
15	SUMBERLAWANG	80	4353,3	0,544	0,00	5
16	MIRI	54	3432,76	0,636	59,59	3
17	GEMOLONG	70	3820,3	0,546	1,04	5
18	KALIJAMBE	127	7453,3	0,587	27,80	4
19	PLUPUH	210	12994	0,619	48,56	3
20	TANON	218	13029	0,598	34,83	4

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat dari perhitungan *scalling* di atas menunjukkan bahwa kecamatan Gondang menjadi kecamatan yang memiliki nilai rasio maksimal yang berarti menjadi kecamatan yang paling berpotensi dalam aspek produktivitas lahan di Kabupaten Sragen. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat gambaran per kecamatan di Kabupaten Sragen seperti di bawah ini:



Sumber: Data diolah

Gambar 10. Hasil *scalling* potensi produktivitas lahan

Ket : Warna	Klasifikasi
	1
	2
	3
	4
	5

4. Kepemilikan lahan; adalah perhitungan *scalling* dengan melihat perbandingan antara luas lahan yang menanam padi organik dengan jumlah petani yang ada pada suatu kecamatan. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Kepemilikan lahan} = \frac{\text{Luas lahan}}{\text{Jumlah petani}}$$

Dari perhitungan *scalling* pada data yang ada dengan rumus tersebut, maka dihasilkan sebagai berikut:

Tabel 20. Hasil *Scalling* potensi kepemilikan lahan

NO.	KECAMATAN	petani	luas lahan	Rasio	Skala	Klasifikasi
1	SRAGEN	2486	1704	0,685	53,82	3
2	KARANGMALANG	1842	1596	0,866	71,25	2
3	SIDOHARJO	1112	893	0,803	65,15	2
4	MASARAN	478	215	0,450	31,13	4
5	KEDAWUNG	3422	1788	0,523	38,13	4
6	NGRAMPAL	103	120	1,165	100,00	1
7	SAMBUNGMACAN	1478	1389	0,940	78,31	2
8	GONDANG	1427	800	0,561	41,80	3
9	SAMBIREJO	1693	1654	0,977	81,89	2
10	TANGEN	132	30	0,227	9,71	5
11	GESI	389	255	0,656	50,94	3
12	JENAR	662	132	0,199	7,02	5
13	MONDOKAN	227	52	0,229	9,88	5
14	SUKODONO	1683	690	0,410	27,30	4
15	SUMBERLAWANG	186	92	0,495	35,45	4
16	MIRI	427	54	0,126	0,00	5
17	GEMOLONG	207	70	0,338	20,38	4
18	KALIJAMBE	249	138	0,554	41,19	3
19	PLUPUH	417	223	0,535	39,31	4
20	TANON	452	218	0,482	34,26	4

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat pada data yang telah diolah dengan perhitungan *scalling* di atas menunjukkan bahwa kecamatan Ngrampal menjadi kecamatan yang memiliki nilai rasio maksimal yang berarti menjadi kecamatan yang paling berpotensi dalam aspek kepemilikan lahan di Kabupaten Sragen. Sedangkan perhitungan tersebut juga menunjukkan bahwa Kecamatan Miri menjadi daerah yang memiliki potensi terendah. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat gambaran per kecamatan di Kabupaten Sragen seperti di bawah ini:



Sumber: Data diolah

Gambar 11. Hasil *scalling* potensi kepemilikan lahan

Ket :	Warna	Klasifikasi
		1
		2
		3
		4
		5

5. Kemampuan petani; adalah perhitungan *scalling* dengan mamperbandingkan antara jumlah Gapoktan dengan jumlah petani yang ada pada suatu kecamatan di Kabupaten Sragen. Perhitungan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Sarana produksi} = \frac{\text{Jumlah Gapoktan}}{\text{Jumlah petani}}$$

Perhitungan data dengan rumus *scalling* di atas menghasilkan gambaran seperti di bawah ini:

Tabel 21. Hasil *Scalling* potensi kemampuan petani

NO.	KECAMATAN	Jumlah petani	Jumlah poktan	Rasio	Skala	Klasifikasi
1	SRAGEN	2486	48	0,019	1,70	5
2	KARANGMALANG	1842	42	0,023	3,47	5
3	SIDOHARJO	1112	56	0,050	17,41	5
4	MASARAN	478	19	0,040	12,04	5
5	KEDAWUNG	3422	94	0,027	5,83	5
6	NGRAMPAL	103	22	0,214	100,00	1
7	SAMBUNGMACAN	1478	73	0,049	16,92	5
8	GONDANG	1427	58	0,041	12,50	5
9	SAMBIREJO	1693	27	0,016	0,00	5
10	TANGEN	132	14	0,106	45,59	3
11	GESI	389	42	0,108	46,56	3
12	JENAR	662	19	0,029	6,45	5
13	MONDOKAN	227	25	0,110	47,65	3
14	SUKODONO	1683	60	0,036	9,97	5
15	SUMBERLAWANG	186	22	0,118	51,78	3
16	MIRI	427	24	0,056	20,37	4
17	GEMOLONG	207	32	0,155	70,15	2
18	KALIJAMBE	249	39	0,157	71,18	2
19	PLUPUH	417	29	0,070	27,12	4
20	TANON	452	23	0,051	17,68	5

Sumber: Data diolah

Hasil yang didapat pada data yang telah diolah dengan perhitungan *scalling* di atas menunjukkan bahwa kecamatan Ngrampal menjadi kecamatan yang memiliki nilai rasio maksimal yang berarti menjadi kecamatan yang paling berpotensi dalam aspek kemampuan petani di Kabupaten Sragen. Sedangkan Kecamatan Sambirejo menjadi daerah yang memiliki potensi terendah, karena dengan Gapoktan yang sedikit, terdapat petani yang banyak. Maka dari hasil perhitungan tersebut dapat dibuat gambaran per kecamatan di Kabupaten Sragen seperti di bawah ini:



Sumber: Data diolah

Gambar 12. Hasil scalling potensi kemampuan petani

Ket :

Warna	Klasifikasi
Green	1
Yellow	2
Red	3
Magenta	4
Blue	5

Setelah ditemukan hasil perhitungan dari tiap aspek dan dihitung dengan metode *scalling*, maka hasil yang diperoleh adalah kecamatan Sragen merupakan daerah yang berpotensi dalam pengembangan padi organik yang disusul oleh kecamatan Sambirejo, Sambungmacan, dan Ngrampal. Sedangkan kecamatan Sumberlawang memiliki potensi terendah dalam pengembangan padi organik.

Berikut tabel hasil perhitungan *scalling* :

Tabel 22. Hasil akhir potensi *re-scaling* padi organik Kabupaten Sragen

NO.	KECAMATAN	Potensi lahan	Intensitas tanam	Produktivitas lahan	Kepemilikan	Kemampuan petani	Total	Scalling	Klasifikasi
1	SRAGEN	100,00	97,30	99,00	53,82	1,70	351,82	100,00	1
2	KARANGMALANG	59,07	82,71	76,91	71,25	3,47	293,40	77,83	2
3	SIDOHARJO	30,53	72,53	71,61	65,15	17,41	257,23	64,10	2
4	MASARAN	7,00	10,85	43,57	31,13	12,04	104,60	6,18	5
5	KEDAWUNG	57,11	74,70	76,27	38,13	5,83	252,04	62,13	2
6	NGRAMPAL	4,75	29,72	68,77	100,00	100,00	303,25	81,57	1
7	SAMBUNGMACAN	57,40	85,10	87,51	78,31	16,92	325,24	89,91	1
8	GONDANG	30,49	90,42	100,00	41,80	12,50	275,21	70,93	2
9	SAMBIREJO	54,26	95,83	95,13	81,89	0,00	327,11	90,62	1
10	TANGEN	0,00	100,00	52,10	9,71	45,59	207,40	45,19	3
11	GESI	9,52	24,84	3,94	50,94	46,56	135,80	18,02	5
12	JENAR	2,45	18,69	77,33	7,02	6,45	111,94	8,97	5
13	MONDOKAN	0,82	100,00	58,12	9,88	47,65	216,47	48,64	3
14	SUKODONO	23,58	70,00	3,20	27,30	9,97	134,04	17,35	5
15	SUMBERLAWANG	1,10	0,00	0,00	35,45	51,78	88,32	0,00	5
16	MIRI	0,74	100,00	59,59	0,00	20,37	180,70	35,06	4
17	GEMOLONG	1,93	100,00	1,04	20,38	70,15	193,50	39,92	4
18	KALIJAMBE	3,87	38,89	27,80	41,19	71,18	182,92	35,90	4
19	PLUPUH	6,57	55,31	48,56	39,31	27,12	176,87	33,60	4
20	TANON	6,02	100,00	34,83	34,26	17,68	192,79	39,65	4

Sumber: Data diolah

Dari hasil pengolahan data tersebut, maka dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Data diolah

Gambar 13. Hasil re-scaling potensi per kecamatan